

**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
LAMUNRE KECAMATAN
BELOPA UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

DELLA RASLI
2104010021

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
LAMUNRE KECAMATAN
BELOPA UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Della Rasli

NIM : 2104010021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 27 juni 2025
Yang membuat pernyataan.


Della Rasli
NIM. 2104010021



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara yang ditulis oleh Della Rasli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010021, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 11 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan 14 Shafar 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 21 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H. I. | Ketua Sidang |
| 2. Ilham, S. Ag., M.A. | Sekretaris Sidang |
| 3. Rismayanti, SE., M.Si. | Penguji I |
| 4. Muh. Ginanjar, SE., M.M | Penguji II |
| 5. Muhammad Ilyas, S. Ag., M.A. | Pembimbing |

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teruntuk cinta pertamaku ayahanda **Rasli**. Penulis mengucapkan terima kasih atas setiap cucuran keringat, kerja keras, motivasi dan dukungan yang papa berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa perkuliahan ini sampai selesai. Dan terima kasih karena tidak pernah meragukan anak perempuanmu ini, serta engkau dapat menjadi contoh bagiku untuk menjadi seorang anak perempuan yang kuat sepertimu. Hidup lebih lama agar aku bisa membahagiakan mu seperti papa yang telah membahagiakan

ku. I love you papa hebatku. Teruntuk wanita kuat dan terhebatku ibunda **Hj Marsi**. Penulis mengucapkan terima kasih telah membesarkanku dengan penuh cinta. terima kasih atas segala doa, pesan, motivasi dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah anakmu ini untuk menjadi seorang yang berpendidikan sepertimu. terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak akan pernah lekang oleh waktu dan terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta menjadi pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang aku tempuh. Hidup lebih lama agar aku bisa membahagiakan mu seperti mama yang telah membahagiakan ku. I love you mamaku tersayang.

Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Palopo, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Ibu Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah. Beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan komitmen tinggi telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan konstruktif selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Rismayanti, SE., M.Si. selaku dosen penguji I, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan ilmiah yang sangat berarti dalam penyempurnaan substansi dan sistematika skripsi ini. Muh. Ginanjar, SE., M.M selaku dosen penguji II, yang telah memberikan tanggapan, arahan, serta evaluasi yang mendalam demi peningkatan kualitas akademik dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang membangun selama masa perkuliahan, sehingga turut berkontribusi dalam proses akademik penulis hingga penyusunan skripsi ini.
7. Zainuddin S S.E., M.Ak., selaku Kepala Perpustakaan UIN Palopo, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan prima serta memfasilitasi kebutuhan literatur dan referensi ilmiah yang sangat menunjang proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh staf UIN Palopo, khususnya staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan bantuan administratif dan dukungan teknis dalam pengurusan berbagai dokumen akademik yang diperlukan selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan kelas EKIS A terkhususnya Alvina, Elvira, lulu, ayuni, Terima kasih atas setiap bantuan dan saran, kritik nya selama masa perkuliahan ini. Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus saudara yang baik untuk penulis, kalian akan selalu teringat sampai kapan pun itu.
10. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis yang tidak bisa di sebutkan namanya, terima kasih atas segala hal yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata hadirnya anda di kehidupan ini cukup memberikan motivasi dan dukungan untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup ini walaupun hanya sementara.
11. Kepada diri saya sendiri, Della Rasli. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan di perjalanan hidup ini, meskipun sering kali ingin menyerah. terima kasih untuk tubuh ini sudah kuat dan terus berjuang melalui proses panjangnya pendidikan dari awal hingga sampai pada tahap skripsi ini. apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Proud of my self! Sekali lagi Terima kasih wanita cantik yang kuat.

Semoga setiap doa, dukungan, motivasi, kerja sama, kebaikan, dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan limpahan rahmat dan pahala yang berlipat oleh Allah Swt., serta senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya dalam

pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Belopa, 17 Juli 2025

Della Rasli

NIM: 2104010021



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kāshrah* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta'murūna*

النَّوْعُ

: *al-nau'*

شَيْءٌ

: *syai'un*

أُمِرْتُ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua namaterakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
PKH	= Program Keluarga Harapan
KPM	= Keluarga Penerima Manfaat
RTM	= Rumah Tangga Miskin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN TEORI.....	 10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Definisi Istilah	33
D. Desain Penelitian	34
E. Data dan Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Pemeriksaan Keabsahaan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	39
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	 41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Analisis Data.....	49
 BAB V PENUTUP.....	 61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66



DAFTAR AYAT

1. Kutipan ayat Q.S At-Taubah/9:60	5
2. Kutipan ayat Q.S Al-Baqarah/2:117.....	15
3. Kutipan ayat Q.S Al-Baqarah/2:21.....	15
4. Kutipan ayat Q.S At-Taubah/9:60	16



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data informan.....	43
-----------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	30
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi wawancara
- Lampiran 3. Surat izin penelitian



ABSTRAK

Della Rasli. 2025. “Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Ilyas.

Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan yang berkenaan dengan peran program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengetahui peran program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berasal dari kepala desa, sekretaris desa, pendamping PKH dan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan terutama melalui aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun, sebagian besar penerima belum mandiri secara ekonomi dan masih bergantung pada bantuan. sehingga program PKH dinilai efektif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan jangka pendek; 2) kendala dalam pelaksanaan PKH meliputi: ketidakpastian jadwal pencairan dana bantuan, permasalahan validasi dan pemutakhiran data, keterbatasan pendamping PKH dan minimnya alat pendukung, minimnya program pendampingan ekonomi, keterbatasan pemahaman dan edukasi penerima pkh, ketergantungan terhadap bantuan dan dampak sosial di masyarakat; 3) PKH telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yakni: meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan serta mendorong perubahan perilaku dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRACT

Della Rasli. 2025. *“The Role of the Family Hope Program in Overcoming Poverty in Lamunre Village, North Belopa District”*. Thesis of the Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, State Islamic University of Palopo. Supervised by Muhammad Ilyas.

This study reveals the main problems related to the role of the family hope program in overcoming poverty. Thus, this study aims to determine the role of the family hope program in overcoming poverty in Lamunre Village, North Belopa District.

The type of research used in this study is qualitative research. Informants in this study came from the village head, village secretary, PKH assistants and families receiving the Family Hope Program (PKH). The research instrument was an interview. Data collection techniques used observation, interviews, literature reviews and documentation. Data analysis used were data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research result show that 1) the Family Hope Program (PKH) in Lamunre Village plays a significant role in poverty alleviation, particularly through economic, educational, health and economic aspects. However, most recipients are not yet economically independent and still depend on assistance. Therefore, the PKH program is considered effective as a short-term poverty alleviation effort. 2) obstacles in PKH implementation include: uncertainty of the disbursement schedule for aid funds, problems with data validation and updating, limited PKH assistants and minimal supporting tools, minimal economic assistance programs, limited understanding and education of PKH recipients, dependence on aid and social impacts in the community. 3) PKH has had a positive impact on community welfare, namely: increasing access to education and health services, reducing expenditures and increasing income, and encouraging behavioral changes in accessing education and health services.

Keywords: Family Hope Program, Poverty Alleviation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meskipun berbagai program pengentasan telah dijalankan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), jumlah masyarakat yang tergolong dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) masih signifikan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Kondisi ini semakin kompleks di tengah ketidakstabilan ekonomi global, inflasi harga kebutuhan pokok, dan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang sempat melemahkan daya beli masyarakat. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penyumbang kemiskinan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan lagi sekadar akibat dari krisis masa lalu, tetapi merupakan tantangan nyata yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data terkini.¹ Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi kebutuhan hak dasar. Hal ini ditandai dengan adanya kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidak

¹Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, and Nur Ambia Arma, "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 8, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>.

mampuan untuk menyampaikan aspirasi yang berdampak pada rendahnya status sosial ekonomi seseorang ditengah masyarakat.²

Kemiskinan di Indonesia hingga September 2024 masih menjadi persoalan utama yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa, yang terdiri dari 11,05 juta jiwa di daerah perkotaan dan 13,01 juta jiwa di daerah perdesaan. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, kondisi ekonomi pascapandemi, inflasi harga kebutuhan pokok, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan masih menjadi faktor yang memperlambat penurunan kemiskinan secara signifikan. Garis kemiskinan nasional per September 2024 ditetapkan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, mencerminkan kebutuhan minimum dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk tidak tergolong miskin. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menyangkut kualitas hidup yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai alokasi anggaran telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk program-program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan. Tidak hanya berfokus pada bantuan masyarakat miskin, pemerintah juga melakukan analisis penyebab terjadinya kemiskinan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satunya yang langsung berhubungan dengan kemiskinan adalah program yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

²Winda Aulya Wardani et al., "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 4 (2023): 2189–96, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>.

Program perlindungan sosial ini dikenal dengan sebutan *Conditional Cash Transfers* (CCT) di dunia.³

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sejak tahun 2007. Program ini diberikan melalui bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴ Hingga triwulan II tahun 2025, PKH telah menjangkau sekitar 95,5% dari total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan sebagian besar penyaluran dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos. Setiap penerima PKH mendapatkan bantuan sesuai kategori yang dimiliki, seperti ibu hamil, anak usia dini, siswa SD hingga SMA, lansia, dan penyandang disabilitas, dengan besaran bantuan berkisar antara Rp900.000 hingga Rp3.000.000 per tahun yang dicairkan setiap triwulan. Pemerintah juga melakukan pembaruan data secara berkala dan telah mencoret sekitar 1,8 juta keluarga yang kondisi ekonominya membaik, untuk memastikan program ini tepat sasaran. Dengan kebijakan ini, PKH diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan mendorong kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya penanggulangan permasalahan kemiskinan yang memiliki tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bantuan tunai bersyarat dan akses layanan

³Saragi, Batoebara, and Arma, "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak."

⁴Arif Sofianto, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Jawa Tengah," *Sosio Konsepsia* 10, no. 1 (2020): 14–31, <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>.

pendidikan maupun kesehatan yang diberikan mampu meningkatkan kualitas dan standar hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH mampu meningkatkan pengeluaran KPM PKH untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, pendidikan anak, maupun kesehatan keluarga. Program Keluarga Harapan juga memberikan kegiatan pemberdayaan yang disebut dengan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya ketergantungan KPM PKH terhadap bantuan sosial yang diberikan.⁵

Sejalan dengan itu, ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan orang miskin dengan menekankan rasa solidaritas dan mengutamakan persaudaraan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan demikian, pelaksanaan PKH bukan hanya menjadi strategi pembangunan sosial-ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam membangun keadilan dan kesejahteraan bersama.⁶

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang paling populer di masyarakat. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan, program ini sangat membantu kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan.⁷ Melalui PKH upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melalui

⁵Isti Putri Utami et al., “Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung,” *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 19–25, <https://doi.org/10.32487/jsdp.v5i1.901>.

⁶Muhammad Alwi et al., “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.

⁷Muhammad Alwi, “Program Keluarga Harapan Dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar,” *Sosio Konsepsia* 11, no. 1 (2021): 307–19, <https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458>.

kementerian sosial berkomitmen memberikan bantuan sosial bersyarat sebagai stimulus kepada masyarakat kurang mampu dan rentan yang sudah terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin.⁸ Program Keluarga Harapan (PKH), sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menekankan pentingnya membantu masyarakat miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan, seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah/9:60 sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa harta zakat, yang bisa disamakan dengan bantuan sosial seperti PKH, diarahkan untuk kesejahteraan kelompok miskin dan yang membutuhkan. Dalam konteks modern, PKH berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah dalam mendistribusikan bantuan kepada kelompok masyarakat kurang mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Hal ini mencerminkan prinsip

⁸Fasiha and Muhammad Alwi, “Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan the Urgence of Financial Management of Households Beneficiaries of the Hope Family Program in Increasing Welfare” 9, no. 01 (2023).

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil, 2020).

keadilan sosial dalam Islam, di mana harta atau bantuan dialokasikan secara tepat untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup mereka yang membutuhkan, sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, program seperti PKH tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mengangkat derajat hidup penerima bantuan secara sosial dan ekonomi.

Desa Lamunre, yang terletak di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, telah berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Namun, efektivitas program ini dalam mengurangi tingkat kemiskinan masih menjadi tanda tanya. Beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bantuan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal pendataan dan penyaluran bantuan, yang sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat, di mana sebagian warga yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, ada indikasi bahwa sebagian penerima PKH masih bergantung pada bantuan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Kurangnya pendampingan dan edukasi dalam pemanfaatan bantuan menjadi salah satu faktor yang memperlambat keberhasilan program ini dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa warga juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan utama PKH.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah ditetapkan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Program
 - a. Penelitian ini hanya membahas Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara.
 - b. Fokus penelitian mencakup bagaimana pelaksanaan PKH, bentuk bantuan yang diberikan, serta mekanisme distribusi bantuan kepada penerima manfaat.
2. Aspek yang Diteliti
 - a. Penelitian ini menelaah dampak PKH terhadap tingkat kemiskinan di Desa Lamunre.
 - b. Aspek yang dianalisis meliputi peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, perubahan pola konsumsi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program dalam penanggulangan kemiskinan juga menjadi bagian dari analisis.
3. Subjek Penelitian
 - a. Penelitian ini melibatkan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Lamunre sebagai responden utama.

- b. Selain itu, penelitian juga melibatkan pihak pendamping PKH dan perangkat desa sebagai informan tambahan.

4. Rentang Waktu

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tertentu berdasarkan data terbaru yang tersedia terkait implementasi PKH di Desa Lamunre.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara?
3. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.
3. Untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan literatur mengenai efektivitas program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Memberikan kontribusi akademik dalam bidang kebijakan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji program bantuan sosial seperti PKH.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PKH.
- b. Membantu pendamping PKH dalam memahami kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tepat.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat mengenai pentingnya memanfaatkan bantuan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu terkait program keluarga harapan dan pencapaian *sustainable development goals*:

1. Penelitian Siti Maimunah yang berjudul Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Untuk Mendukung Pencapaian SDGs 2030 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik pengabsahan data yang dilakukan menggunakan triangulasi (gabungan). Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme penyaluran PKH, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan efektif. 2) Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin untuk mendukung pencapaian SDGs 2030 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sudah efektif dan tersalurkan dengan baik, dibuktikan dengan indikator efektifitas yang mencakup pemahaman program, tepat sasaran,

tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁰

2. Penelitian Sudirman yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan konsep proses collaborative governance dari Ansell dan Gash. Hasil studi ini menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Kendari dalam upaya pencapaian SDGs telah melibatkan partisipasi berbagai aktor pemerintah maupun non pemerintah dan PKH mampu untuk mengurangi kemiskinan yang selaras dengan tujuan SDGs ke- 1. Namun berbagai kendala dan tantangan juga hadir dalam pelaksanaan PKH dalam pencapaian SDGs di Kota Kendari seperti minimnya keterlibatan sektor privat dan keterbatasan pendanaan.¹¹
3. Penelitian Ashar yang berjudul Dampak Multidimensi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak Program Keluarga Harapan yang ditinjau dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, hukum, tata kelola, dan lingkungan Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif kualitatif dengan teknik analisis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam jangka pendek

¹⁰Siti Maimunah, "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Untuk Mendukung Pencapaian SDGs 2030 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember," *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2024).

¹¹Sudirman, "Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Neo Societal* 5, no. 4 (2020): 381–94, http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Ambo_Upe/9.COLLABORATIVE_GOVERNANCE.pdf.

dalam menangani kemiskinan dan kesenjangan namun dinilai masih kurang efisien. PKH masih sering salah sasaran dan penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan jadwal.¹²

B. Deskripsi Teori

1. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian peran

Menurut Abdulsyani, peran merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu tingkah laku akibat dari suatu status sosial seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.¹³

b. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial juga di kenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam

¹²Baihaqi Ashar and Hendi Pratama, "Dampak Multidimensi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Jakarta," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 16, <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.358>.

¹³Abdulsyani, *Sosiologi Sistemika Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

penanggulangan kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.¹⁴

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), bahwa PKH ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk PKH sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.¹⁵

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam penanggulangan kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.³⁴

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses

¹⁴Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017).

¹⁵Kemensos, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.

c. Tujuan PKH

Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka pendek yakni, dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), sedangkan dalam jangka panjang, tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memutus mata rantai kemiskinan, serta mengubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kemensos¹⁶, diantaranya:

- 1) Menciptakan perubahan dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- 3) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

¹⁶Kemensos, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021).

- 5) Memperkenalkan barang dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan mengurangi ketimpangan sosial dapat dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya membantu orang miskin dan memperhatikan kesejahteraan sosial, seperti:

Q.S Al-Baqarah/2:177 yang berbunyi:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Terjemahnya:

“Bukanlah kebaikan itu hanya menghadap ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, Hari Akhir, malaikat, Kitab-kitab, dan Nabi-nabi, serta memberikan hartanya-baik ketika lapang maupun sempit-kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang meminta-minta”.¹⁷

Q.S Al-Baqarah/2:215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.¹⁸

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Q.S At-Tawbah/9:60 yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁹

Ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yang sejalan dengan tujuan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mendukung mereka yang kurang mampu.

d. Indikator Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Penerima manfaat PKH dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa komponen yaitu komponen kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. Setiap komponen memiliki kriteria sebagai berikut:²⁰

- 1) Komponen Kesejahteraan Sosial, seperti lanjut usia (lansia) yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) dan penyandang disabilitas berat atau yang kedisabilitasnya tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari dan bergantung pada orang lain, yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK).

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁰Kemensos, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021).

- 2) Komponen Pendidikan, yaitu anak sekolah yang berusia 6-21 tahun, yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun, wajib belajar tersebut meliputi tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA.
- 3) Komponen Kesehatan, seperti ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini, rentang usia 0-6 tahun. Ibu hamil, ibu dalam masa nifas, ibu menyusui, dan anak usia dini (0-6 tahun) adalah kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam kesehatan. Pemantauan kesehatan, asupan gizi yang tepat, serta imunisasi yang sesuai sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi, mengurangi angka kematian ibu dan anak, dan mendukung tumbuh kembang fisik dan mental anak. Program kesehatan bagi kelompok ini fokus pada pemenuhan gizi, pemeriksaan rutin, dan pencegahan penyakit yang dapat mengganggu perkembangan mereka
- e. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
 - 1) Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, antara lain:²¹
 - a) Menerima bantuan sosial PKH
 - b) Mendapat pendampingan sosial
 - c) Pelayanan fasilitas kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
 - d) Melaksanakan program bantuan tambahan atau komplementer pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan serta penyediaan kebutuhan dasar lainnya.
 - 2) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, antara lain:²²

²¹Kemensos, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021).

- a) Wajib menerima perawatan medis di fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, serta anak berusia 0 (nol) hingga 6 (enam) tahun.
- b) Bagi anggota keluarga yang memiliki komponen lanjut usia (lansia) mulai dari 60 (enam puluh) tahun atau penyandang disabilitas berat wajib mengikuti program kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) tahun sekali.
- c) Keluarga Penerima Manfaat hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulannya.
- d) Dalam kegiatan pendidikan dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif untuk anak usia sekolah yang harus mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

f. Mekanisme Pelaksanaan PKH

1) Perencanaan

Jumlah dan lokasi calon KPM PKH direncanakan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan menggunakan informasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS mungkin tidak tersedia bagi korban bencana sosial, bencana alam, atau Komunitas Adat Terpencil (KAT).

2) Penetapan Calon Peserta PKH

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Direktur Jaminan Sosial Keluarga menetapkan jumlah dan wilayah peserta calon peserta

²²Kemensos, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021).

PKH berdasarkan tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Informasi mengenai angka kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi elemen yang harus diperhatikan dalam memilih daerah penerima PKH.

3) Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping PKH melakukan Pertemuan Awal (PA) melalui sosialisasi untuk memastikan calon anggota KPM PKH siap bergabung menjadi peserta PKH dan memiliki pemahaman dasar tentang program tersebut. Prosedur berikut digunakan untuk pertemuan awal dan validasi, diantaranya sebagai berikut :

a) Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

Pertemuan awal sekaligus untuk melakukan validasi data dilakukan dengan membandingkan data awal calon penerima manfaat PKH dengan fakta dan bukti kondisi terbaru sesuai dengan kriteria komponen PKH (eligible). Data awal tersebut berasal dari penetapan calon Penerima Manfaat (PM) PKH yang dikirimkan kepada pendamping PKH melalui e-PKH untuk dilakukan validasi. Pendamping PKH dapat melakukan persiapan Pertemuan Awal diawali dengan menentukan lokasi pertemuan yang telah dikoordinasikan kepada kepala desa setempat, kemudian pendamping PKH membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai data yang tercantum.

b) Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

Dalam proses ini pendamping PKH melakukan dua hal, yaitu sosialisasi dan pelaksanaan validasi. Pendamping PKH memberikan beberapa informasi mengenai tujuan PKH, syarat terkait KPM PKH, hak dan kewajiban beserta sanksi KPM PKH apabila tidak memenuhi kewajibannya, mekanisme dan prosedur pengaduan PKH, serta memberikan penjelasan mengenai penyaluran

bantuan sosial PKH. Hal ini disampaikan saat sosialisasi. Validasi dilakukan kepada calon KPM PKH yang diundang dan hadir pada pertemuan awal. Bagi yang diundang namun tidak hadir, maka pendamping sosial PKH datang ke rumah KPM dan menandatangani formulir pengesahan.

Sesuai pedoman dalam petunjuk pelaksanaan validasi, kegiatan validasi menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi. Setelah itu, KPM PKH melengkapi data pembukuan rekening bank yang memungkinkan KPM PKH mengakses perbankan dan menyalurkan bansos PKH. Data hasil validasi KPM PKH harus memenuhi persyaratan *Know Your Customer* (KYC) yang digunakan untuk melakukan pembukuan rekening bank secara kolektif (burekol), data tersebut meliputi nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu kandung dan alamat tempat tinggal saat ini.

4) Penetapan KPM PKH

Direktur Jaminan Sosial Keluarga bertanggung jawab dalam menetapkan KPM PKH. Direktorat menetapkan data KPM PKH terkini dengan menggunakan data yang terkini dan data yang berasal dari hasil validasi calon KPM PKH yang memenuhi syarat kepesertaan PKH. Selanjutnya data dengan status rekening aktif dikategorikan sebagai KPM PKH sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

2. Teori *Welfare State*

Teori *welfare state* adalah teori yang di cetuskan oleh Bentham. Teori ini berasumsi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Konsep teori ini berdasarkan atas kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip

utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.²³

Konsep kesejahteraan pada teori ekonomi di kenal dengan ekonomi kesejahteraan (*Welfare Economics*) yang berarti pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi kesejahteraan karena memiliki keterkaitan pembangunan ekonomi suatu masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, distribusi faktor produksi juga salah satu konsep dalam ekonomi kesejahteraan yang menjelaskan distribusi faktor produksi barang dan jasa yang termasuk perekonomian kepada masyarakat. Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan.

NASW (*National Association of Social Workers*) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.²⁴ Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan

²³ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol* 2(1) (2016) : 103.

²⁴ Chales Zhastrow, *Introduction To Social Work And Social Welfare* (Belmont: Cengage Learning, 2010); 3

mengkerucut pada dua poin utama, yaitu (a) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (b) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.²⁵

Salah satu sistem ekonomi yang banyak dikembangkan disejumlah negara adalah *welfare state*. Didalam konsep ini, negara memiliki kebijakan publik bersifat bantuan, pelayanan, perlindungan ataupun pencegahan masalah sosial. Adanya asuransi sosial merupakan ciri yang paling mendasar dari konsep *welfare state*. Secara singkat, negara kesejahteraan (*welfare state*) diterjemahkan dengan artian dimana pemerintahan negara diklaim mempunyai tanggung jawab didalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap kehidupan pada tiap-tiap penduduk negaranya. *Welfare state* juga dapat diartikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang membuat peranan yang luar biasa kepada negara (pemerintah) guna mengalokasikan pendanaan negara demi menjamin warganya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.²⁶

3. Teori Modal Sosial (*Social Capital*)

Dalam bahasa yang lebih sederhana, modal sosial pada dasarnya adalah jalinan yang menghubungkan antara individu dan kelompok masyarakat, yang memberi dampak positif bagi masing-masing pihak. Menurutnya, jalinan yang menghubungkan antara individu dan masyarakat bukanlah suatu yang muncul begitu saja (*given*), melainkan merupakan hasil interaksi secara individual maupun kolektif yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga menghasilkan relasi yang bersifat jangka panjang. Sedangkan Coleman, *social*

²⁵ E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015): 2.

²⁶ Pamungkas, T. J., & Hariri, A. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), (2022): 270-283. <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>

capital merupakan sumber daya yang memberikan dampak berupa kemampuan bagi individu-individu untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Coleman menekankan kapasitas modal sosial sebagai kekuatan untuk menyelesaikan bermacam persoalan dalam masyarakat. Menurutnya, *social capital* muncul seiring dengan interaksi antar individu yang membentuk struktur atau pola yang menghubungkan individu-individu tersebut. Struktur atau pola itu mencakup norma yang tercipta dari interaksi, nilai dalam perilaku, pengetahuan, serta relasi antar individu.²⁷

Selanjutnya Putnam dan dikembangkan dalam konteks Indonesia oleh Apriyanto.²⁸ Menurut Apriyanto, modal sosial seperti jaringan komunitas, kepercayaan, dan norma timbal balik dapat diperkuat melalui interaksi dalam program bantuan sosial seperti PKH. Keberadaan kelompok pertemuan rutin, pendampingan, dan kewajiban sosial dalam program ini menciptakan struktur sosial yang mendukung peningkatan kapabilitas individu dan keluarga miskin. Sedangkan Fukuyama menegaskan bahwa *social capital* merupakan syarat mutlak bagi terciptanya demokrasi yang stabil. Ia juga mengungkapkan bahwa modal sosial sangat berpengaruh pada efisiensi dari fungsi perekonomian modern.²⁹

²⁷ Dollu, E. B. S., & Tokan, F. B. (2020). MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Warta Governare*, 1(1), (2020): 61. <https://journal.unwira.ac.id> > article > download

²⁸ Apriyanto, "Modal Sosial Dalam Program Bantuan Sosial: Studi Pada Penerima Program Keluarga Harapan Di Indonesia," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 17, no. 1 (2022): 45–60.

²⁹ Dollu, E. B. S., & Tokan, F. B., "MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur". *Jurnal Warta Governare*, 1(1), (2020): 62. <https://journal.unwira.ac.id> > article > download

4. Teori Hierarki Kebutuhan

Abraham Maslow seorang psikologis klinis memperkenalkan teori kebutuhan berjenjang yang dikenal sebagai Teori Maslow atau Hierarki Kebutuhan Manusia yang mengemukakan lima kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis, kemudian akan naik tingkat setelah kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi, begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan paling tinggi yakni aktualisasi diri.³⁰

- a. Kebutuhan Fisiologis: Merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian dan seks.
- b. Kebutuhan Rasa Aman: Merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas, sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman.
- c. Kebutuhan Sosial: Merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang - orang sekelilingnya atau lingkungannya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya.
- d. Kebutuhan Ego: Merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis, reputasi dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat

³⁰ Sumarwan, U. *Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain.

- e. **Kebutuhan Aktualisasi Diri:** Merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut.³¹

5. Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau golongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak, meliputi sandang, pangan dan papan.³² Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.³³ Kemiskinan adalah kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, sakit namun tak mampu memeriksakan diri ke dokter, tidak memiliki akses ke pendidikan dan tak tahu cara membaca, tidak mempunyai pekerjaan, serta hidup dalam kekhawatiran akan masa depan.³⁴

Kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya

³¹ Bari, A., & Hidayat, R, "Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget". *MOTIVASI Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1) (2022): 8-14.

³² BPS, *Kemiskinan Dan Ketimpangan* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).

³³ Dian Ghani Reza Dasangga and Eko Fajar Cahyono, "Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1060, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>.

³⁴ Khabib Alia Akhmad, "Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 6 (2021): 173–81, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/419>.

mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.³⁵

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan di mana sebagian penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak awal peradaban manusia dan terus menjadi tantangan dari masa ke masa. Kemiskinan berwajah banyak dan bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, serta kondisi lingkungan. Munculnya kemiskinan juga tidak lepas dari adanya ketimpangan distribusi pendapatan, perbedaan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan kesenjangan upah, serta keterbatasan dalam pemenuhan modal. Berbagai faktor ini membentuk suatu pola yang saling memperkuat dan berulang, yang dikenal dalam teori sebagai lingkaran kemiskinan, di mana

³⁵ Yesi Triani, Maya Panorama, and Rinol Sumantri, "Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 158, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635>.

kemiskinan menjadi sulit diputus dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁶

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan mempunyai beberapa aspek, antara lain yaitu aspek primer berupa miskin akan organisasi sosial politik, miskin akan aset dan miskin akan pengetahuan serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan sumber keuangan, jaringan sosial dan informasi. Dimensi-dimensi tersebut terwujud dalam bentuk kekurangan air bersih, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, kekurangan gizi, dan tingkat pendidikan yang rendah.³⁷

b. Macam-macam kemiskinan

Kemiskinan memiliki arti yang luas dan memang dalam pengukurannya pun tidak mudah. Ada dua macam ukuran kemiskinan yang paling sering digunakan, yaitu:³⁸

1) Kemiskinan absolut

Pada dasarnya kemiskinan sering disangkutpautkan dengan perkiraan atas dasar tingkat kebutuhan dan pendapatan. Perkiraan atas dasar tingkat pendapatan seringkali hanya terbatas pada kebutuhan pokok maupun kebutuhan dasar minimum yang mungkin untuk seseorang bisa hidup dengan layak. Orang bisa

³⁶ Rudy Susanto and Indah Pangesti, "Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 7, no. 2 (2021): 271, <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>.

³⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

³⁸ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

dikatakan miskin ketika pendapatan seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan minimumnya. Dengan begitu, kemiskinan bisa diukur dari perolehan kebutuhan dasarnya, dengan cara membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan. Tingkat pendapatan minimum atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Maksud dari konsep ini yaitu untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan tempat untuk menjamin kelangsungan hidup.

Dalam perhitungan konsep kemiskinan, kesulitan utamanya yaitu pada penentuan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan, tetapi juga dipengaruhi oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial dibutuhkan barang-barang dan jasa agar seseorang bisa hidup dengan layak. Kebutuhan dasar dibagi menjadi dua yaitu: kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Di satu sisi, UNRISD (*United Nation Research Institute for Social Development*) membagi kebutuhan dasar menjadi tiga kelompok utama, yaitu: pertama, kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan. Kedua, kebutuhan kultural meliputi pendidikan, ketenangan hidup, waktu luang dan rekreasi. Dan ketiga kebutuhan yang muncul karena adanya surplus pendapatan, sehingga memungkinkan muncul keinginan untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya.

2) Kemiskinan relatif

Seseorang yang sudah mempunyai pendapatan dan sudah mampu menutupi kebutuhan dasarnya tidak selalu bisa dikatakan tidak miskin. Meskipun pendapatan seseorang bisa mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika pendapatan orang tersebut masih jauh dibawah pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih dalam kategori miskin. Ini bisa terjadi, karena lingkungan sekitar lebih banyak menjadi penentu faktor kemiskinan seseorang (kemiskinan ditentukan dari lingkungan yang bersangkutan).

c. Indikator kemiskinan

Adapun indikator kemiskinan menurut Tambunan adalah sebagai berikut.³⁹

1) Pendapatan

Jumlah besarnya gaji atau pendapatan seseorang dari hasil kerja rata-rata per minggu, bulanan maupun tahunan merupakan ukuran yang paling umum digunakan, tetapi untuk mengetahui informasi pendapatan seseorang tidaklah mudah. Maka dari itu langkah alternatifnya adalah menggunakan nilai rata-rata konsumsi mingguan, bulanan maupun tahunan. Namun jika hanya menggunakan data pendapatan seseorang yang didapatkan dari hasil kerjanya yang dijadikan sebagai tolok ukur biasanya tidak bisa menunjukkan sesuai fakta sebenarnya. Misalkan seseorang yang mempunyai pendatan rendah namun tergolong kaya

³⁹Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018).

karena mempunyai banyak aset atau mendapatkan warisan yang sangat banyak dari orang tuanya.

2) Makanan yang dikonsumsi

Makanan sebagai salah satu indikator kemiskinan harus dilihat dari jumlah porsi dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Orang miskin lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk porsi makanan dibandingkan dengan non makanan seperti pakaian, kendaraan, perlengkapan rumah tangga dan lainnya. Sedangkan untuk kualitas makanan, semakin miskin seseorang maka semakin rendah pula kualitas makanan yang dikonsumsi. Karena salah satu indikator untuk mengukur kecukupan makanan tidak hanya dari segi volumenya saja, melainkan asupan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut juga perlu diperhatikan seperti protein dan kalori, terutama gizi untuk anak-anak.

3) Tempat tinggal

Salah satu indikator kemiskinan adalah kualitas dan bentuk tempat tinggal. Umumnya rumah orang miskin mempunyai kualitas yang kurang memadai seperti kualitas bahan bangunan yang digunakan, dari sisi kenyamanan, keselamatan dan kesehatan juga kurang. Sedangkan jika dilihat dari bentuknya rumah orang-orang miskin cenderung lebih kecil dan sederhana dibandingkan dengan rumah orang kaya.

4) Pendidikan formal

Pendidikan formal menjadi salah satu indikator dari kemiskinan, dimana pendidikan tidak hanya dilihat dari tingkatannya saja melainkan dari kualitasnya juga perlu diperhatikan. Indikator kemiskinan berdasarkan pendidikan meliputi angka partisipasi sekolah, jumlah anak yang terdaftar sekolah, angka melek

huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk diatas usia 15 tahun serta indeks pembangunan manusia.

5) Infrastruktur dasar rumah tangga

Indikator kemiskinan berdasarkan infrastruktur dasar rumah tangga meliputi air bersih, sanitasi layak, listrik yang cukup, telekomunikasi, dan akses transportasi yang baik.

6) Kesehatan

Kesehatan sebagai indikator kemiskinan terdiri dari dua komponen yang meliputi akses pelayanan yang baik misalnya persentase dari jumlah populasi yang mempunyai akses ke pelayanan kesehatan yang layak. Komponen yang kedua adalah rata-rata kondisi kesehatan masyarakat, indikatornya berupa persentase dari jumlah masyarakat bergizi baik.

d. Penyebab kemiskinan

Kemiskinan diberbagai negara bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya, yaitu:⁴⁰

- 1) Faktor globalisasi. Biasanya dalam globalisasi akan memunculkan negara pemenang yaitu negara maju dan negara kalah yang bisa disebut negara berkembang. Ini bisa terjadi dikarenakan negara berkembang kalah dalam persaingan di pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi, hal ini mengakibatkan negara berkembang semakin terpinggirkan. Karena negara-negara berkembang menjadi terpinggirkan maka jumlah kemiskinan jauh lebih besar daripada kemiskinan di negara maju.

⁴⁰Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

- 2) Faktor pembangunan. Kemiskinan bisa disebabkan karena pola pembangunan yang diterapkan, contohnya kemiskinan pada wilayah perdesaan yang diakibatkan karena proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan. Lalu kemiskinan perkotaan yang diakibatkan karena hakikat dan cepatnya proses pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok mendapatkan keuntungan.
- 3) Faktor sosial, yaitu kondisi sosial masyarakat yang merugikan beberapa kelompok masyarakat. Kondisi sosial yang dimaksud seperti bias gender, diskriminasi, ataupun eksploitasi ekonomi. Contohnya seperti kemiskinan yang dialami oleh anak-anak, wanita, atau kelompok minoritas.
- 4) Faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan juga tingginya jumlah penduduk. Faktor inilah yang menyebabkan kemiskinan didalam masyarakat.

e. Indikator Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Menurut Bapennas, kemiskinan dapat dilihat dari keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mengukur penanggulangan kemiskinan mengacu pada tiga aspek utama tersebut:⁴¹

- 1) Aspek pendidikan, pendidikan berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan karena kualitas sumber daya manusia menentukan produktivitas

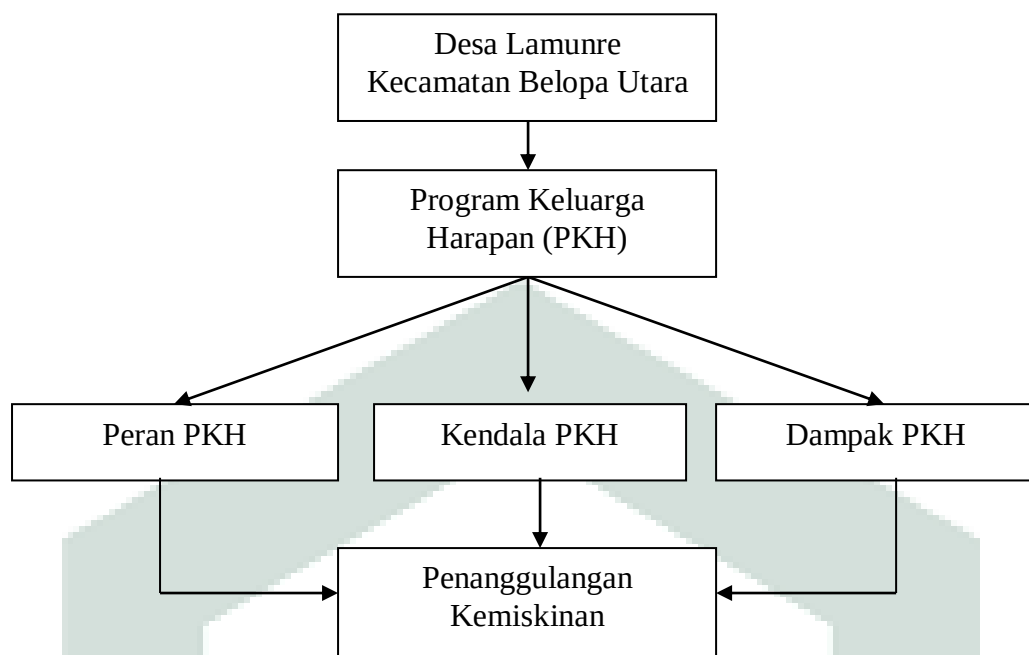
⁴¹ Chelvin Aldiansyah, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* 3, No. 1 (2024), 31-32

dan kesejahteraan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, pemenuhan kebutuhan sekolah dan menurunnya angka putus sekolah.

- 2) Aspek Kesehatan, juga menjadi indikator penting dalam penanggulangan kemiskinan karena kesehatan yang buruk akan menurunkan produktivitas dan menambah beban ekonomi rumah tangga. Indikator kesehatan dapat dilihat dari akses terhadap layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan pemenuhan gizi anak.
- 3) Aspek Ekonomi, merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi pendapatan dan konsumsi, pemenuhan kebutuhan pokok dan pengurangan beban pengeluaran.

C. Kerangka Pikir

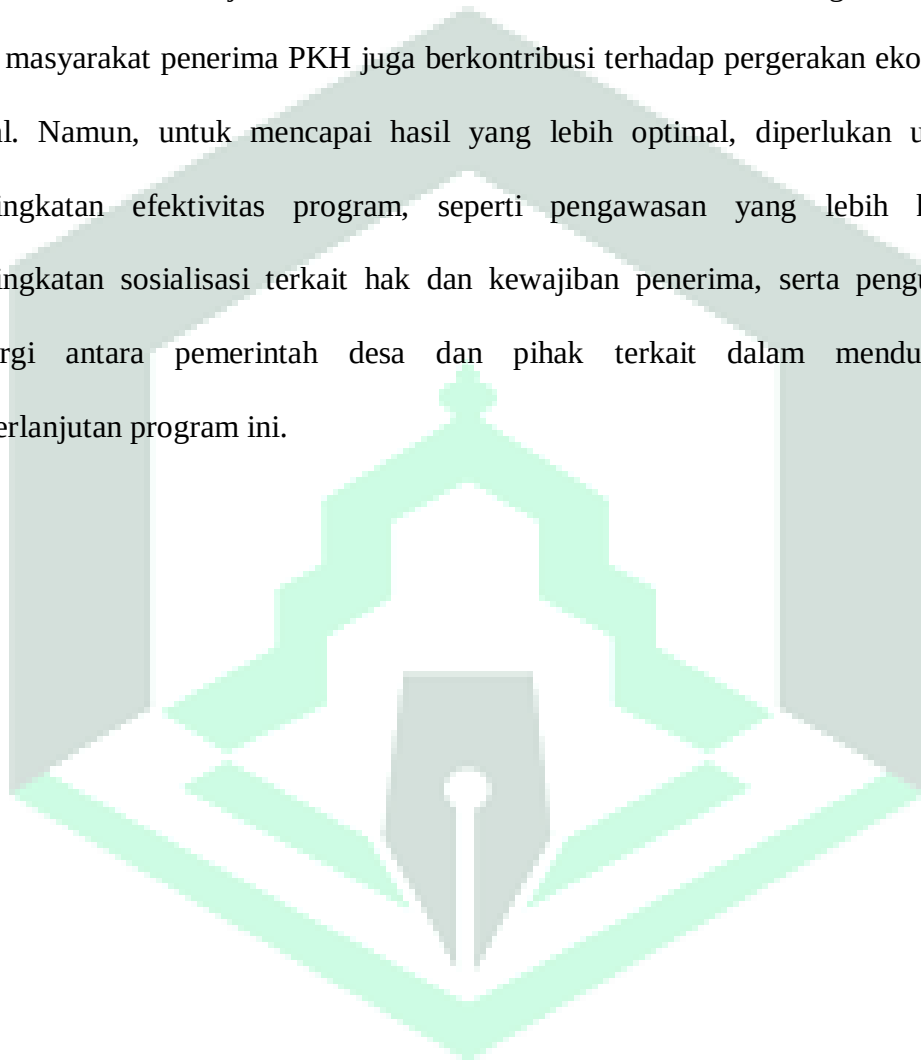
Untuk mengetahui tentang variabel yang akan diteliti, akan digambarkan dalam kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan serta kesehatan, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya pendampingan intensif dari petugas terkait. Selain itu, faktor administratif dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan manfaat PKH bagi penerima di desa tersebut.

Dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamunre cukup signifikan, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak penerima manfaat dan memperbaiki kondisi kesehatan keluarga miskin. Dengan adanya bantuan ini, banyak keluarga yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menjadi lebih terbantu dalam hal ekonomi. Peningkatan daya beli masyarakat penerima PKH juga berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi lokal. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya peningkatan efektivitas program, seperti pengawasan yang lebih ketat, peningkatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban penerima, serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dan pihak terkait dalam mendukung keberlanjutan program ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan.⁴² Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang memberikan sebuah gambaran atau uraian atas suatu keadaan sebagaimana yang diteliti dan dipelajari sehingga hanya merupakan suatu fakta.⁴³ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018).

⁴³Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PPM, 2018).

diamati.⁴⁴ Berdasarkan uraian tersebut penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, tentang Peran program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara, baik dari sisi implementasi program, pemanfaatan bantuan oleh keluarga penerima manfaat (KPM), serta dampaknya terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian juga memfokuskan pada peran pendamping PKH, tingkat partisipasi KPM, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di tingkat desa.

C. Defenisi Istilah

1. Peran

Peran adalah tindakan atau fungsi yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah peran Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan miskin, dengan

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

syarat tertentu seperti keikutsertaan anak dalam pendidikan dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, serta lansia. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian usaha atau kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperbaiki taraf hidup mereka. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah usaha Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga penerima manfaat (KPM).

4. Desa Lamunre

Desa Lamunre adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang menjadi lokasi penelitian dalam melihat implementasi dan dampak dari Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat miskin.

5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Keluarga Penerima Manfaat adalah rumah tangga yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

D. Desain Penelitian

Desain ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti merumuskan masalah, menentukan fokus penelitian, menetapkan tujuan, menyusun pedoman wawancara, dan memilih

lokasi serta informan yang dianggap relevan dan memiliki informasi yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan di Lapangan

Tahap ini mencakup proses turun langsung ke lokasi penelitian, yaitu Desa Lamunre. Peneliti melakukan observasi lingkungan sosial dan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping PKH, serta aparat desa.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung terhadap kegiatan PKH di lapangan, dan dokumentasi terhadap berbagai arsip atau data pendukung. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi informan di lapangan.

4. Reduksi dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk menemukan makna-makna penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya data-data yang menunjang. Data-data ini kemudian diolah melalui sejumlah langkah. Pertama-tama dilakukan penyeleksian terhadap data dilakukan berdasarkan pada dasar-dasar kebenaran dan bobot data tersebut. Kemudian data-

data tersebut dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas.⁴⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Informan ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini berasal dari kepala desa, sekretaris desa, pendamping PKH dan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif berperan penting dalam menggali data yang mendalam dan komprehensif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang secara langsung melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di lapangan. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan aktif dalam melakukan observasi, wawancara, serta mencatat fenomena sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Desa Lamunre.

Untuk mendukung pelaksanaan wawancara yang terarah, peneliti juga menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman ini disusun berdasarkan fokus penelitian dan digunakan untuk menggali informasi dari berbagai informan, antara lain:

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Pedoman wawancara untuk KPM berisi pertanyaan terkait proses penerimaan bantuan, manfaat bantuan, pemanfaatan dana bantuan, dampak sosial-ekonomi, dan persepsi mereka terhadap program.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

2. Pendamping PKH

Pedoman wawancara untuk pendamping PKH mencakup pertanyaan mengenai tugas pendamping, proses seleksi KPM, monitoring pelaksanaan program, hambatan pelaksanaan, serta pandangan mereka terhadap efektivitas PKH.

3. Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat

Pedoman ini digunakan untuk memperoleh pandangan dari pihak desa mengenai peran PKH dalam pembangunan sosial masyarakat, keterlibatan pemerintah desa, serta dukungan masyarakat terhadap program.

Instrumen ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan dinamika yang ditemukan di lapangan, sebagaimana lazimnya dalam pendekatan kualitatif. Peneliti juga mencatat hasil observasi langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung (seperti laporan kegiatan PKH, daftar KPM, dan dokumentasi foto) untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama urgensi metode pembelajaran. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang bagaimana urgensi peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak terkait atau subjek penelitian, yaitu penerima manfaat PKH, pendamping sosial, aparat desa, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Luwu, dan masyarakat non-penerima PKH.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik yang lazim digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, dan informan. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai informan seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping PKH, dan aparat desa untuk melihat konsistensi informasi.

2. Triangulasi Teknik: Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian antar data yang diperoleh.
3. Triangulasi Waktu: Pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang berbeda untuk memastikan stabilitas informasi.

I. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisa data meliputi:

1. Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi pada keluarga penerima PKH.
2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dari kesemuanya kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.
3. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pemeriksaan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dapat menggambarkan seluruh atau sebagian dari aspek yang diteliti.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi sebagai bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data harus dilaporkan kebenarannya, kekokohan dan kelancarannya yaitu yang merupakan validitasnya.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif. Sesudah meninggalkan lapangan, menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian, pengarahan tenaga fisik dan pikiran, selain itu peneliti perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori baru yang mungkin ditemukan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Desa Lamunre

Desa Lamunre merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini berada di kawasan dataran dengan aksesibilitas yang relatif baik dibandingkan wilayah pegunungan di bagian utara kabupaten. Meskipun tidak termasuk daerah terpencil, Desa Lamunre masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang umum terjadi di wilayah pedesaan, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan publik yang optimal.

Secara administratif, Desa Lamunre berbatasan dengan beberapa desa lain di Kecamatan Belopa Utara. Lokasinya yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu menjadikan desa ini memiliki potensi strategis untuk pengembangan, baik di bidang pertanian, peternakan, maupun sektor jasa. Desa ini juga menjadi bagian dari wilayah yang mengalami transformasi pembangunan secara bertahap, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Jumlah penduduk Desa Lamunre berdasarkan data tahun 2024 mencapai sekitar 2.270 jiwa yang tersebar dalam 568 kepala keluarga. Komposisi penduduk terdiri dari 1.095 laki-laki dan 1.175 perempuan. Masyarakat di desa ini hidup dalam tatanan sosial yang cukup erat, dengan semangat gotong royong yang masih kuat. Hubungan kekeluargaan dan adat lokal masih menjadi nilai penting dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Miskin di Desa Lamunre Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah/Keterangan
1	Total Kepala Keluarga (KK)	568 KK
2	Jumlah KK Miskin	113 KK
3	Persentase Kemiskinan (%)	19,9%

Tabel 4.2 Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre Tahun 2023–2024

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH	Keterangan
1	2023	131 KK	Penerima tetap berdasarkan DTKS
2	2024	120 KK	Pengurangan akibat update data sosial ekonomi

Asal-usul masyarakat Desa Lamunre tidak terlepas dari migrasi dan perkembangan penduduk Luwu secara historis. Sebagai bagian dari Tana Luwu, Desa Lamunre memiliki akar budaya yang kaya, meskipun tidak sekuat wilayah adat di pegunungan. Masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang etnis, namun tetap menjaga harmoni dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bersama.

Dalam bidang ekonomi, sebagian besar penduduk Desa Lamunre bermata pencaharian sebagai petani, nelayan air tawar, dan pedagang kecil. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi sawah, jagung, sayuran, serta hasil perikanan air tawar. Sistem pertanian modern mulai diperkenalkan melalui program penyuluhan dan bantuan alat pertanian dari pemerintah daerah. Selain itu, sebagian masyarakat juga mengembangkan usaha mikro di bidang kerajinan dan kuliner lokal. Infrastruktur di Desa Lamunre perlahan mulai berkembang. Jalan desa sebagian besar sudah beraspal, meskipun masih ada beberapa ruas jalan lingkungan yang memerlukan perbaikan. Akses terhadap listrik dan jaringan komunikasi juga cukup baik, meskipun belum merata. Pemerintah desa dan

kecamatan terus berupaya mengajukan anggaran pembangunan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, saluran irigasi, dan gedung layanan masyarakat.

Masyarakat Desa Lamunre juga menghadapi tantangan sosial, terutama terkait pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Kasus-kasus seperti kebakaran rumah akibat korsleting listrik atau masalah sanitasi masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian. Pemerintah desa bekerja sama dengan dinas terkait untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya keselamatan dan kebersihan lingkungan.

Salah satu perhatian utama masyarakat saat ini adalah pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi desa, seperti pasar desa dan irigasi pertanian. Warga berharap agar setiap proyek pembangunan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dianggap penting untuk menjamin keberhasilan program dan mencegah konflik. Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, Desa Lamunre merupakan contoh desa yang sedang tumbuh dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Komitmen terhadap nilai-nilai lokal, ketahanan sosial, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi desa menjadikan Lamunre sebagai wilayah yang layak mendapatkan perhatian dan dukungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Data Informan

Berikut ini hasil wawancara dengan informan mengenai indikator kemiskinan, yaitu:

Tabel 4.3 Data Informan

No	Nama	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Tanggungan	Kategori PKH	Status Rumah	Penghasilan/bulan	Status Kemiskinan
1	Suhaeda	Hardianto	2	Anak SD dan Usia Dini	Tinggal Sama Orang Tua	Rp300.000-800.000	Kemiskinan Absolut
2	Hasnawiyah	Hasnawiyah	1	Sekolah Dasar	Rumah Sendiri	Rp300.000	Kemiskinan Absolut
3	Hariani	Hendrik	3	Anak SD/SMP dan Balita	Rumah Sendiri	Rp300.000-500.000	Kemiskinan Absolut
4	Santi	Wahyuning	2	Anak SD	Rumah Sendiri	Rp300.000-500.000	Kemiskinan Absolut
5	Darwis Amir	Darwis Amir	1	Lansia	Rumah Sendiri	Tidak Menetap	Kemiskinan Absolut
6	Sandra	Sandi	1	Pendidikan/Anak SD	Rumah Sendiri	Rp300.000-800.000	Kemiskinan Absolut

Informan pertama atas nama Suhaeda dengan kepala keluarga Hardianto merupakan salah satu keluarga penerima bantuan sosial PKH, yang termasuk dalam kategori memiliki anak usia sekolah dasar dan usia dini. Keluarga ini memiliki tanggungan 2, tinggal menumpang di rumah orang tua dan memiliki penghasilan antara Rp300.000-Rp800.000 perbulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka status kemiskinan termasuk kemiskinan absolut dikarenakan kondisi dimana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup secara layak. Status tempat tinggal yang masih dengan orang tua serta ketergantungan pada bantuan PKH memperkuat indikator bahwa keluarga belum mandiri secara ekonomi. Dalam aspek kemandirian, keluarga ini belum menunjukkan kemampuan ekonomi yang mandiri dikarenakan tidak memiliki

usaha apapun, tinggal dengan orang tua, dan hanya mengandalkan gaji bulanan serta bantuan sosial PKH.

Informan kedua atas nama Hasnawiyah sekaligus kepala keluarga merupakan salah satu keluarga penerima bantuan sosial PKH, yang termasuk dalam kategori memiliki anak usia sekolah dasar. Keluarga ini memiliki tanggungan 1, tinggal di rumah sendiri dan memiliki penghasilan Rp300.000 perbulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka status kemiskinan termasuk kemiskinan absolut dikarenakan kondisi dimana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kepemilikan rumah tidak serta merta mencerminkan kemandirian ekonomi terlebih jika tidak disertai dengan kemampuan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak.

Informan ketiga atas nama Hariani dan nama kepala keluarga adalah Hendrik merupakan salah satu keluarga penerima bantuan sosial PKH, yang termasuk dalam kategori memiliki anak SD/SMP dan Balita. Keluarga ini memiliki tanggungan 3, tinggal di rumah sendiri dan memiliki penghasilan Rp300.000-Rp500.000 perbulan. Jumlah tanggungan yang cukup banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda menjadi beban ekonomi yang besar bagi keluarga Hariani. Berdasarkan informasi tersebut, maka status kemiskinan termasuk kemiskinan absolut dikarenakan kondisi dimana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, kecukupan gizi anak dan biaya sekolah. Dalam aspek kemandirian, keluarga ini belum menunjukkan kemampuan ekonomi yang mandiri dikarenakan tidak memiliki usaha apapun dan hanya mengandalkan gaji bulanan serta bantuan sosial PKH.. Meskipun keluarga ini memiliki rumah

sendiri, kepemilikan rumah tidak serta merta mencerminkan kemandirian ekonomi.

Informan keempat atas nama Santi dengan kepala keluarga Wahyuning merupakan salah satu keluarga penerima bantuan sosial PKH, yang termasuk dalam kategori memiliki anak SD. Keluarga ini memiliki tanggungan 2, tinggal di rumah sendiri dan memiliki penghasilan Rp300.000-Rp500.000 perbulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka status kemiskinan termasuk kemiskinan absolut dikarenakan kondisi dimana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan biaya sekolah. Meskipun berada dalam kondisi kemiskinan absolut namun, terdapat indikasi usaha untuk mandiri dari keluarga ini. Salah satu bentuk kemandiriannya adalah anggota keluarga turut membantu usaha kecil-kecilan/warung seperti menjual jajanan. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif dan peran aktif dalam menopang kebutuhan keluarga, meskipun dalam lingkung terbatas. Namun, dari sisi kemampuan ekonomi menyeluruh, kemandirian keluarga masih membutuhkan dukungan dari porgram bantuan dari pemerintah.

Informan kelima, atas nama Darwis yang juga merupakan kepala keluarga merupakan salah satu keluarga penerima bantuan sosial PKH, yang termasuk dalam kategori lansia. Keluarga ini memiliki tanggungan 1, tinggal di rumah sendiri dan penghasilan tidak menetap setiap bulannya. Berdasarkan informasi tersebut, meskipun Darwis memiliki rumah sendiri, kondisi ekonomi masih tidak stabil karena penghasilannya tidak menetap yang artinya tidak memiliki sumber penghasilan yang pasti. Ketika pendapatan tidak menetap, sangat sulit untuk merencanakan kebutuhan dasar seperti sembako, obat-obatan dan perawatan kesehatan bagi lansia. Berdasarkan kondisi ini termasuk dalam kategori

kemiskinan absolut karena ia tidak memiliki penghasilan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu-satunya bukti kemandiriannya adalah telah memiliki rumah sehingga tidak bergantung pada pihak lain dalam hal tempat tinggal. Namun dari sisi ekonomi ia belum tergolong mandiri karena masih bergantung pada bantuan sosial PKH untuk memenuhi kebutuhan sembako, obat-obatan dan perawatan kesehatan.

Informan keenam, atas nama Sandra dengan kepala keluarga bernama Sandi merupakan salah satu keluarga penerima bantuan sosial PKH, yang termasuk dalam kategori memiliki anak usia sekolah dasar. Keluarga ini memiliki tanggungan 1, tinggal di rumah sendiri dan memiliki penghasilan Rp300.000-Rp800.000perbulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka status kemiskinan termasuk kemiskinan absolut dikarenakan kondisi dimana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan anak. Dalam aspek kemandirian, keluarga ini belum menunjukkan kemampuan ekonomi yang mandiri dikarenakan tidak memiliki usaha apapun dan hanya mengandalkan gaji bulanan serta bantuan sosial PKH untuk kebutuhan pendidikan anak. Meskipun keluarga ini memiliki rumah sendiri, kepemilikan rumah tidak serta merta mencerminkan kemandirian ekonomi.

Keenam penerima PKH tersebut adalah Suhaeda, Hasnawiyah, Sandra, Darwis Amir, Hariani, dan Santi, yang mewakili kelompok rumah tangga miskin sebagai target utama program. Masing-masing informan memberikan gambaran mengenai peran, kendala, dan dampak PKH terhadap kehidupan mereka sehari-hari, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi keluarga.

Selain itu, satu orang pendamping PKH bernama Ibu Armayanti berperan sebagai informan teknis yang menjelaskan proses pendampingan, kendala operasional, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat lapangan. Dua informan lainnya merupakan perwakilan pemerintah desa, yaitu Ibu Nurlaelah sebagai Sekretaris Desa dan Bapak Syahrir sebagai Kepala Desa, yang memberikan perspektif kelembagaan dan administratif terkait pelaksanaan PKH. Informasi dari ketiga informan ini memberikan dimensi struktural yang melengkapi sudut pandang para penerima manfaat, sehingga keseluruhan data dalam tabel menjadi dasar penting dalam menganalisis peran dan efektivitas Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah penelitian.

3. Analisis Data

a. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.

1) Wawancara dengan Penerima PKH

Enam orang penerima bantuan PKH di Desa Lamunre menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka terkait peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre.

Ibu Suhaeda, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih bersekolah, menjelaskan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak. Ia menyampaikan:

“Bantuan PKH sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama pendidikan anak-anak. Saya juga pernah ikut pelatihan gizi anak dari pendamping PKH.”⁴⁶

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa informan merasakan langsung manfaat program PKH dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan anak. Selain bantuan tunai, ia juga mengakses layanan edukatif seperti pelatihan gizi, yang menandakan adanya aspek non-material dalam program.

Ibu Hasnawiyah, seorang janda dengan empat anak, juga merasakan peran dari program PKH, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan. Dalam keterangannya ia menyatakan:

“Ya, adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu perekonomian saya, terutama untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan sekolah anak.”⁴⁷

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa bantuan PKH digunakan untuk dua aspek utama, yaitu kebutuhan konsumsi rumah tangga (sembako) dan biaya pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan PKH dalam meringankan beban ekonomi keluarga miskin telah tercapai secara langsung.

Bapak Darwis Amir, seorang lansia penerima PKH, menekankan bahwa bantuan yang diterima sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk membeli sembako dan obat-obatan. Ia juga merasa dipermudah dalam akses pelayanan kesehatan di puskesmas. Ia menyampaikan:

“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu. Setelah saya menerima bantuan PKH, biasanya saya gunakan untuk membeli sembako dan obat-obatan. Selama

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Suhaeda, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Hasnawiyah, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

menerima bantuan PKH, saya juga merasa dimudahkan dalam pelayanan di puskesmas ketika hendak berobat.”⁴⁸

Pernyataan informan menunjukkan bahwa program PKH tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi rumah tangga berupa bantuan pangan dan kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. Sebagai lansia, Bapak Darwis merasakan manfaat nyata dalam bentuk pengurangan beban biaya pengobatan serta dukungan administratif di puskesmas. Hal ini mencerminkan tercapainya salah satu tujuan PKH dalam mendukung kelompok rentan secara sosial dan kesehatan.

Ibu Hariani, seorang ibu dari anak balita, mengaku memanfaatkan bantuan PKH untuk membeli susu dan makanan tambahan bagi anaknya. Ia juga rutin membawa anak ke posyandu dan mengikuti penyuluhan gizi. Ia menjelaskan:

“Alhamdulillah, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang saya terima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan. Biasanya saya gunakan untuk membeli susu dan makanan tambahan. Saya juga rutin membawa anak ke posyandu dan mengikuti penyuluhan gizi.”⁴⁹

Kutipan di atas menunjukkan bahwa bantuan PKH berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi, terutama untuk balita. Informan juga aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan dasar seperti posyandu, serta mengikuti kegiatan edukatif berupa penyuluhan gizi, yang merupakan bagian dari komponen kesehatan dalam program PKH. Hal ini mencerminkan adanya perubahan positif dalam kesejahteraan keluarga sejak bergabung dalam program PKH dimana keberhasilan program dalam membentuk perilaku sehat dan responsif terhadap kebutuhan anak.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Darwis Amir, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Hariani, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

Ibu Sandra, salah satu penerima PKH, menjelaskan bahwa bantuan yang diterimanya sangat berarti dalam membiayai keperluan sekolah anak, khususnya pada awal tahun ajaran. Ia menuturkan:

“Dana PKH sangat membantu biaya pendidikan anak-anak, apalagi saat masuk sekolah. Saya gunakan untuk beli seragam, tas, dan buku. Saya juga rutin ikut pertemuan PKH, banyak informasi soal kesehatan dan pendidikan anak.”⁵⁰

Kutipan ini menunjukkan bahwa bantuan PKH dirasakan langsung manfaatnya dalam mendukung pembiayaan pendidikan anak, terutama pada masa krusial seperti tahun ajaran baru. Informan juga aktif mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pendamping PKH, yang dinilai bermanfaat karena memuat materi kesehatan dan pendidikan.

Ibu Santi, seorang ibu rumah tangga, menyatakan bahwa bantuan PKH sangat bermanfaat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga serta perlengkapan sekolah anak-anaknya. Ia berkata:

“Iya, terbantu sekali. Kalau sudah diterima uangnya, saya pakai beli kebutuhan rumah dan perlengkapan sekolah anak-anakku. Anakku juga dapat bantuan di sekolah karena punya PKH.”⁵¹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa bantuan PKH telah memberikan dukungan konkret bagi informan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga dan biaya pendidikan. Bantuan tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung oleh keluarga, tetapi juga berdampak pada penerimaan bantuan tambahan di sekolah karena status sebagai penerima PKH. Namun, ketidakkonsistenan jadwal pencairan menjadi kendala yang mengganggu

⁵⁰Wawancara dengan Ibu Sandra, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁵¹Wawancara dengan Ibu Santi, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

perencanaan keuangan keluarga. Meskipun demikian, informan tetap merasakan manfaat besar dari program ini, khususnya dalam mengurangi beban biaya pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dari keenam informan yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Lamunre mengenai peran program PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Secara umum, para informan menyatakan bahwa kehadiran PKH memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan terutama melalui pemenuhan indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Program ini mampu meringankan beban ekonomi keluarga, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, dan meningkatkan kesadaran kesehatan keluarga. Walaupun belum sepenuhnya mengangkat keluarga dari kemiskinan secara berkelanjutan dikarenakan informan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan belum memiliki kemandirian ekonomi sepenuhnya, akan tetapi program PKH ini dinilai sudah efektif dalam penanggulangan kemiskinan jangka pendek. Misalnya dalam aspek ekonomi, sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan tunai dari PKH mampu meringankan beban ekonomi keluarga. Bantuan tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti memberi bahan makanan, membayar listrik, dan sebagian kecil dialokasikan untuk modal usaha kecil-kecilan seperti berjualan makanan atau sembako di rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa PKH telah membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan mencegah mereka jatuh pada kondisi kemiskinan yang lebih parah. Dengan demikian, indikator ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan terpenuhi walaupun belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Kemudian, dalam aspek pendidikan, informan mengungkapkan bahwa bantuan PKH sangat membantu keberlangsungan sekolah anak-anak mereka. Para orang tua merasa lebih mampu menyediakan perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, dan alat tulis. Temuan ini sesuai dengan indikator penanggulangan kemiskinan dalam aspek pendidikan yaitu meningkatnya akses dan partisipasi sekolah bagi anak-anak penerima manfaat. Selain aspek ekonomi dan pendidikan, bantuan PKH juga berperan penting dalam aspek kesehatan, bantuan PKH ini sangat membantu penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan seperti pelayanan imunisasi pada anak, pemeriksaan gizi anak, dan pemeriksaan atau pengecekan kesehatan lansia sehingga para informan tidak khawatir lagi akan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, indikator kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan sudah terpenuhi, karena keluarga penerima manfaat menunjukkan peningkatan akses dan kesadaran kesehatan. Tentu, hal ini berdampak pada berkurangnya kasus sakit yang serius di kalangan anak-anak penerima PKH.

2) Wawancara dengan Pendamping PKH

Ibu Armayanti, pendamping PKH di Desa Lamunre, menjelaskan bahwa program PKH memberikan dampak signifikan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan dan kesehatan anak-anak dari keluarga miskin. Ia menyampaikan:

“Sebagian besar penerima mulai sadar pentingnya posyandu dan pendidikan karena kewajiban program.”⁵²

⁵²Wawancara dengan Ibu Armayanti, pendamping PKH di Desa Lamunre

Pernyataan Ibu Armayanti mencerminkan bahwa program PKH mulai berhasil mengubah pola pikir dan perilaku keluarga penerima manfaat, terutama dalam hal partisipasi pendidikan dan kesehatan.

3) Wawancara dengan Kepala Desa

Bapak Syahrir, Kepala Desa Lamunre, menyatakan bahwa program PKH sangat membantu menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Ia menuturkan:

“PKH sangat terasa manfaatnya, apalagi untuk keluarga yang punya anak sekolah. banyak keluarga mampu mempertahankan anak-anak mereka tetap bersekolah berkat dukungan finansial dari program tersebut.”⁵³

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan bahwa PKH dipandang sebagai program yang berperan strategis dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan.

4) Wawancara dengan Sekretaris Desa

Ibu Nurlaelah, Sekretaris Desa Lamunre, menjelaskan bahwa pendataan awal penerima PKH dilakukan melalui koordinasi antara kader desa dan pendamping PKH, kemudian diverifikasi oleh pemerintah desa sebelum dimasukkan ke dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menyampaikan:

“Kami lihat dampaknya dari meningkatnya kehadiran anak-anak di sekolah dan posyandu.”⁵⁴

Menurutnya, program PKH cukup efektif dalam meringankan beban hidup masyarakat miskin. Meningkatnya kehadiran anak di sekolah dan posyandu menjadi indikator awal keberhasilan program.

⁵³Wawancara dengan Bapak Syahrir, Kepala Desa Desa Lamunre

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Nurlaelah, Sekretaris Desa Desa Lamunre

b. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara.

1) Wawancara dengan Penerima PKH

Enam orang penerima bantuan PKH di Desa Lamunre menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre.

Ibu Suhaeda, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih bersekolah, menjelaskan kendala yang pernah ia alami selama pelaksanaan PKH di Desa Lamunre. Ia menyampaikan:

“Iya, saya pernah mengalami kendala dalam pencairan dana dimana, dana tersebut mengalami keterlambatan. Saya juga pernah ikut pelatihan gizi anak dari pendamping PKH.”⁵⁵

Ibu Hasnawiyah, seorang janda dengan empat anak, juga berpendapat bahwa:

“Kalau soal bantuan, memang membantu. Tapi terus terang banyak juga yang hanya dipakai untuk kebutuhan harian, habis begitu saja. Belum semua bisa dipakai untuk usaha atau hal yang bisa bikin kami mandiri. Jadi kadang rasa-rasanya kami jadi terlalu bergantung pada bantuan PKH.”⁵⁶

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa informan menyoroti kendala dalam pemanfaatan bantuan yang cenderung bersifat konsumtif. Bantuan PKH lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga cepat habis, dan belum sepenuhnya diarahkan pada upaya produktif yang dapat meningkatkan

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Suhaeda, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Hasnawiyah, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

kemandirian ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan, yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan jangka panjang program PKH, yaitu memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Bapak Darwis Amir, seorang lansia penerima PKH, juga mengalami kendala dalam pelaksanaan bantuan PKH. Ia menyampaikan:

“Saya mengalami kendala dalam penerimaan dana dikarenakan kurang informasi teknik PKH.”⁵⁷

Kutipan di atas menandakan bahwa informan mengalami hambatan dalam kelancaran akses informasi pencairan dan penerimaan bantuan.

Ibu Hariani, seorang ibu dari anak balita, mengaku memiliki kendala dalam pelaksanaan bantuan PKH. Ia menjelaskan:

“Sejak ada PKH, kadang muncul rasa iri dari tetangga yang tidak dapat bantuan. Mereka bilang kenapa kami yang dapat, padahal menurut mereka masih ada keluarga lain yang lebih susah. Jadi agak kurang enak karena mereka membicarakan kami yang dapat bantuan.”⁵⁸

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa informan mengeluhkan adanya dampak sosial berupa munculnya rasa iri dari tetangga yang tidak menerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi PKH di masyarakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi penerima, tetapi juga menimbulkan dinamika sosial yang dapat memengaruhi keharmonisan hubungan antarwarga. Fenomena ini menegaskan bahwa transparansi data dan keadilan dalam penentuan penerima menjadi faktor penting untuk meminimalisir kecemburuan sosial dalam pelaksanaan program.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Darwis Amir, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Hariani, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

Ibu Sandra, salah satu penerima PKH, menjelaskan terkait kendala dalam pelaksanaan bantuan PKH. Ia menuturkan:

“Iya, kendalanya berupa minimnya program pendampingan ekonomi, misalnya pelatihan keterampilan atau bantuan tambahan, saya harap ke depan bisa ada kegiatan pemberdayaan ekonomi juga.”⁵⁹

Kutipan ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan dalam program pendampingan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan usaha produktif. Hal ini menjadi catatan penting bahwa meskipun program PKH telah memenuhi dimensi bantuan konsumtif dan edukatif, perlu dikembangkan pula aspek pemberdayaan agar keluarga penerima dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Ibu Santi, seorang ibu rumah tangga, menyatakan bahwa ia belum sepenuhnya paham apa saja peruntukkan dari program PKH ini sehingga ia terkendala terkait edukasi penggunaan bantuan. Ia menjelaskan bahwa:

“Kalau ada sosialisasi, kadang saya tidak sempat hadir, jadi tidak terlalu paham bagaimana cara menggunakan bantuan supaya lebih bermanfaat. Jadinya ya dipakai begitu saja, tidak diarahkan untuk usaha atau yang lain.”⁶⁰

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa informan mengalami keterbatasan pemahaman karena tidak selalu mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pendamping. Hal ini menyebabkan bantuan PKH lebih banyak dimanfaatkan secara spontan untuk kebutuhan konsumtif tanpa diarahkan pada penggunaan yang lebih produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi penerima dalam kegiatan

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Sandra, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Santi, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

pendampingan, di mana rendahnya keterlibatan dapat menghambat tercapainya tujuan PKH dalam meningkatkan kemandirian keluarga miskin.

2) Wawancara dengan Pendamping PKH

Ibu Armayanti, selaku pendamping PKH di Desa Lamunre, menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program PKH. Ia menyampaikan:

“Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program PKH di lapangan. Seperti keterbatasan transportasi, beban administrasi, serta masalah validasi data yang sering tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.”⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Ibu Armayanti mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendamping, seperti keterbatasan transportasi, beban administrasi, serta masalah validasi data yang sering tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia berharap ke depan ada peningkatan fasilitas operasional dan pelatihan tambahan bagi pendamping PKH agar dapat menjalankan peran secara lebih optimal.

Efektivitas program sangat dipengaruhi oleh peran pendamping di lapangan, yang tidak jarang terbentur oleh hambatan teknis seperti sarana transportasi dan administrasi. Ketidaksesuaian data penerima juga menjadi tantangan dalam menjamin keadilan distribusi bantuan. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan sistemik terhadap peran pendamping, baik dari sisi fasilitas maupun kompetensi.

3) Wawancara dengan Kepala Desa

Bapak Syahrir, Kepala Desa Lamunre, menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program PKH. Ia menuturkan:

⁶¹Wawancara dengan Ibu Armayanti, pendamping PKH di Desa Lamunre

“Data kadang tidak sesuai. Ada yang harusnya dapat, tapi belum terdata.”⁶²

Menurutnya, pemerintah desa turut membantu dalam proses verifikasi dan pendampingan lapangan, bekerja sama dengan pendamping PKH. Ia juga mengungkapkan bahwa belum semua pengajuan program pelengkap seperti pelatihan keterampilan atau bantuan ekonomi produktif disetujui oleh pemerintah daerah. Untuk itu, ia menyampaikan harapannya:

“Kami harap ada kolaborasi lebih luas agar program ini tidak sekadar memberi bantuan, tapi juga mendorong kemandirian.”⁶³

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan bahwa PKH dipandang sebagai program yang berperan strategis dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan. Namun keberlanjutan manfaat PKH juga sangat ditentukan oleh ketepatan data serta perluasan program pendukung lainnya. Keterlibatan pemerintah desa dalam verifikasi dan fasilitasi menjadi kunci keberhasilan program, sementara kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat transformasi dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.

4) Wawancara dengan Sekretaris Desa

Ibu Nurlaelah, Sekretaris Desa Lamunre, menjelaskan kendala dalam pelaksanaan program PKH di Desa Lamunre. Ia menyampaikan:

“Tya saya masih mengalami kendala administratif dalam pelaksanaan program PKH khususnya dalam pembaharuan data, dimana ladang perubahan data tidak langsung terupdate ke pusat.”⁶⁴

⁶²Wawancara dengan Bapak Syahrir, Kepala Desa Desa Lamunre

⁶³Wawancara dengan Bapak Syahrir, Kepala Desa Desa Lamunre

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Nurlaelah, Sekretaris Desa Desa Lamunre

c. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara

1) Wawancara dengan Penerima PKH

Enam orang penerima bantuan PKH di Desa Lamunre menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka terkait dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat:

Ibu Suhaeda, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih bersekolah, menjelaskan bahwa dampak bantuan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan:

“Bantuan PKH sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama pendidikan anak-anak. Namun, saya berharap ada tambahan modal usaha kecil supaya bisa mandiri secara ekonomi.”⁶⁵

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa informan merasakan langsung manfaat program PKH dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan anak. Harapan untuk memperoleh bantuan dalam bentuk modal usaha menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mendukung kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima PKH.

Ibu Hasnawiyah, seorang janda dengan empat anak, berpendapat mengenai dampak bantuan PKH bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam keterangannya ia menyatakan:

“Dampak PKH ini sangat terasa pada pendidikan anak-anak saya. Dulu, mereka sering absen karena kami tidak punya ongkos atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak. Apalagi saya memiliki 4 anak dan hanya mengandalkan penghasilan bulanan yang tidak cukup memenuhi

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Suhaeda, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

kebutuhan anak saya. Namun, sekarang setelah adanya bantuan PKH ini, mereka jadi lebih rajin ke sekolah, karena kebutuhan sekolah seperti buku tulis, alat tulis, seragam yang layak dan lain sebagainya sudah terpenuhi. Bahkan anak saya jadi lebih semangat untuk belajar. ini membuat saya optimis bahwa mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik.”⁶⁶

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa bantuan PKH berdampak dalam meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar sekolah, kehadiran, dan motivasi belajar anak-anak meningkat sehingga membuka peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan mereka.

Bapak Darwis Amir, seorang lansia penerima PKH, menekankan bahwa bantuan yang diterima sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk membeli sembako dan obat-obatan. Ia menyampaikan:

“Alhamdulillah, bantuan PKH ini sangat membantu sekali terutama bagi lansia seperti saya. Dulu, untuk makan sehari-hari saja saya agak kesusahan dikarenakan tidak memiliki pendapatan yang menetap. Setelah saya menerima bantuan PKH, biasanya saya gunakan untuk membeli sembako dan obat-obatan. Saya juga lebih percaya diri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena terdapat pengurangan biaya dan dukungan administrasi di puskesmas.”⁶⁷

Pernyataan informan menunjukkan bahwa program PKH memiliki dampak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar harian bagi lansia. Terutama terkait kebutuhan pokok dan obat-obatan. Sebagai lansia, Bapak Darwis merasakan manfaat nyata dalam bentuk pengurangan beban biaya pengobatan serta dukungan administratif di puskesmas. Hal ini mencerminkan tercapainya salah satu tujuan PKH dalam mendukung kelompok rentan secara sosial dan kesehatan. Namun, seperti pada informan lain, belum terlihat indikasi adanya

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Hasnawiyah, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Darwis Amir, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

program tambahan dari desa yang mendukung kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima PKH.

Ibu Hariani, seorang ibu dari anak balita, juga berpendapat mengenai dampak bantuan PKH bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan:

“Jelas ada perubahan yang signifikan. Bantuan PKH ini sangat membantu daya dalam memenuhi kebutuhan gizi balita saya. Dulu, saya sering kesulitan untuk membeli susu atau makanan bergizi lainnya. Sekarang, dengan adanya bantuan ini, saya bisa lebih fokus untuk memastikan anak saya mendapatkan asupan gizi yang cukup. Saya juga rutin membawa anak ke posyandu dan mengikuti penyuluhan gizi. Saya merasa lebih tenang karena kesehatan anak saya lebih terjamin.”⁶⁸

Kutipan di atas menunjukkan bahwa bantuan PKH memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas gizi dan akses kesehatan balita. Bantuan ini memungkinkan keluarga untuk lebih optimal dalam penyediaan kebutuhan gizi balitanya.

Ibu Sandra, salah satu penerima PKH, berpendapat mengenai dampak bantuan PKH bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menuturkan:

“Saya terasa sekali perubahannya. Dulu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak itu sulit sekali dikarenakan penghasilan orang tuanya juga kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Namun, sejak ada PKH beban itu sedikit berkurang. Anak-anak saya bisa membeli kebutuhan sekolah yang layak.”⁶⁹

Kutipan ini menunjukkan bahwa bantuan PKH memberikan dampak yang signifikan dalam meringankan beban biaya pendidikan anaknya. Hal ini terlihat dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah dasar yang sebelumnya sulit terpenuhi.

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Hariani, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Sandra, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

Ibu Santi, seorang ibu rumah tangga, berpendapat mengenai dampak bantuan PKH bagi kesejahteraan masyarakat. Ia berkata:

“Iya, ada dampak perubahan yang signifikan terutama dalam aspek kebutuhan dasar rumah tangga dan pendidikan anak.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa bantuan PKH telah memberikan dukungan konkret bagi informan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga dan meringankan beban biaya pendidikan anak.

2) Wawancara dengan Pendamping PKH

Ibu Armayanti, pendamping PKH di Desa Lamunre, menjelaskan bahwa program PKH memberikan perubahan kualitas hidup keluarga penerima manfaat setelah mengikuti program PKH. Ia menyampaikan:

“Tentu. Jika bicara soal kualitas hidup, saya sebagai pendamping melihat peningkatan yang cukup jelas dan merata meskipun intensitasnya bervariasi di setiap keluarga. Misalnya, dari sisi kesehatan. Dulu banyak ibu-ibu yang memiliki balita tidak rutin ke posyandu atau lansia tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas karena berbagai kendala termasuk finansial. Setelah ikut PKH, mereka lebih patuh pada jadwal pemeriksaan kesehatan dan rutin mengunjungi posyandu setiap bulannya. Ini bukan hanya soal dana akan tetapi, juga kesadaran yang terbangun dari pendampingan yang kami berikan. Kemudian dari sisi pendidikan, anak-anak penerima manfaat yang tadinya tidak memiliki perlengkapan sekolah yang memadai, namun sekarang mereka bisa sekolah dengan tenang. Terakhir, dari sisi ekonomi. Meskipun dana PKH tidak besar akan tetapi bagi keluarga yang kurang, dana ini sangat berarti. Mereka jadi tidak terlalu khawatir soal kebutuhan pokok harian dan bahkan ada keluarga penerima manfaat yang menyisihkan dana PKH untuk modal usaha kecil-kecilan. Meski kecil, ini bisa meningkatkan pendapatan keluarga.”⁷¹

Pernyataan Ibu Armayanti mencerminkan bahwa program PKH ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Santi, salah satu penerima PKH di Desa Lamunre

⁷¹Wawancara dengan Ibu Armayanti, pendamping PKH di Desa Lamunre

penerima manfaat PKH. Perubahan tersebut diantaranya, perbaikan status kesehatan terutama bagi ibu yang memiliki balita dan lansia, peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta peningkatan ekonomi rumah tangga.

3) Wawancara dengan Kepala Desa

Bapak Syahrir, Kepala Desa Lamunre, menyatakan bahwa program PKH sangat membantu menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Ia menuturkan:

“PKH sangat terasa manfaatnya, apalagi untuk keluarga yang punya anak sekolah.”⁷²

Ia juga menjelaskan bahwa banyak keluarga mampu mempertahankan anak-anak mereka tetap bersekolah berkat dukungan finansial dari program tersebut.

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan bahwa PKH dipandang sebagai program yang berperan strategis dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan.

4) Wawancara dengan Sekretaris Desa

Ibu Nurlaelah, Sekretaris Desa Lamunre, berpendapat mengenai dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan:

“Kami lihat dampaknya dari meningkatnya kehadiran anak-anak di sekolah dan posyandu.”⁷³

Menurutnya, program PKH cukup efektif dalam meringankan beban hidup masyarakat miskin.

⁷²Wawancara dengan Bapak Syahrir, Kepala Desa Desa Lamunre

⁷³Wawancara dengan Ibu Nurlaelah, Sekretaris Desa Desa Lamunre

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam keluarga penerima manfaat (KPM), satu pendamping PKH, kepala desa, dan sekretaris desa, ditemukan beberapa poin penting yang mencerminkan peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan atau kendala dalam pelaksanaan program PKH, dan dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamunre.

1. Peran PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk intervensi strategis pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional. Program ini dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya, PKH menasar kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, dan siswa sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Program ini telah berjalan selama 10 tahun dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Desa Lamunre.

Program ini terbukti membantu biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menyediakan perlindungan sosial. Namun demikian, keberlangsungan PKH dalam jangka panjang juga menghadirkan tantangan, seperti ketergantungan terhadap bantuan dan minimnya penguatan kapasitas produktif keluarga penerima. Oleh sebab itu, keberlanjutan PKH di Desa Lamunre perlu dibarengi dengan strategi

pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi agar tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre, diketahui beberapa peran PKH dalam penanggulangan kemiskinan yaitu:

a. Peran dalam aspek pendidikan

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lamunre menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi besar dalam aspek pendidikan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan yang diberikan secara berkala oleh pemerintah melalui program ini mampu meringankan beban ekonomi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa sebelum mendapatkan bantuan PKH, mereka seringkali kesulitan dalam biaya pendidikan anak, menyediakan perlengkapan sekolah seperti seragam, alat tulis, buku, jajan di sekolah dan transportasi kesekolah. Dengan adanya bantuan PKH, mayoritas keluarga merasa sangat terbantu dalam meringankan beban dalam membiayai anak sekolah. Bantuan tunai yang diberikan biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas pendidikan, seperti biaya pendidikan anak, pembelian perlengkapan sekolah seperti seragam, tas sekolah, sepatu, alat-alat tulis, jajan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa PKH menjadi solusi langsung atas kendala finansial yang mereka hadapi sehingga kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi.

Hal ini memperlihatkan bahwa bantuan PKH di Desa Lamunre pada aspek pendidikan sudah memiliki peran yang baik. Dengan adanya bantuan PKH dapat

membantu KPM PKH dalam memenuhi kebutuhan anak sekolah. Selain itu, orang tua siswa juga sudah memiliki kesadaran yang baik dimana dana bantuan yang diperoleh tidak dipergunakan untuk kepentingan yang lain melainkan dipergunakan untuk kepentingan anak sekolah.

Hal ini tentu memberikan dampak nyata dalam mempertahankan akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, khususnya di saat-saat krusial seperti awal tahun ajaran. Menurut teori hierarki kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Maslow, individu akan lebih mudah mencapai aktualisasi diri, termasuk pendidikan, apabila kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan rasa aman telah terpenuhi.⁷⁴ Dalam konteks ini, PKH memberikan kontribusi penting dalam menjamin aspek kebutuhan dasar keluarga prasejahtera sehingga memungkinkan anak-anak tetap bersekolah.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnaini dan Anggraini, yang menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH sangat membantu keberlangsungan pendidikan anak, khususnya dalam pembelian perlengkapan sekolah dan biaya kebutuhan dasar lainnya. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa keberlanjutan dan ketepatan waktu pencairan bantuan menjadi faktor penting dalam mencegah anak dari risiko putus sekolah.⁷⁵

b. Peran dalam aspek kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan KPM PKH di Desa Lamunre, diketahui bahwa selama ini PKH yang dilaksanakan sudah sangat

⁷⁴Maslow A. H, *Motivasi dan Kepribadian* (Jakarta: Erlangga, 2016).

⁷⁵Isnaini & Anggraini, "Pengaruh Bantuan Sosial PKH terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak dari Keluarga Penerima Manfaat", *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 20, 1 (2022).

berperan baik dalam aspek kesehatan. Dengan adanya bantuan PKH masyarakat penerima bantuan mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam aspek kesehatan. Selain itu, masyarakat penerima manfaat PKH juga memiliki kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan ke fasilitas-fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas. Hal ini disebabkan karena adanya kewajiban dalam program yang mewajibkan peserta untuk rutin mengakses layanan kesehatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Program Keluarga Harapan tidak hanya berperan sebagai bantuan finansial, melainkan juga menjadi stimulan perubahan perilaku positif dalam aspek kesehatan anak maupun lansia. Program ini mendorong kepatuhan terhadap kewajiban kunjungan ke posyandu, meningkatkan kesadaran dalam pemeriksaan kesehatan lansia serta meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara teratur serta kesadaran.

Adanya bantuan PKH tersebut, masyarakat sudah sangat membantu kebutuhan layanan kesehatan seperti pelayanan imunisasi bagi anak, pemenuhan gizi untuk anak balita, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, dan pemeriksaan kesehatan bagi lansia. Sehingga masyarakat penerima bantuan PKH tidak lagi khawatir akan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan Maslow, yang menyatakan bahwa setelah kebutuhan dasar (seperti pangan dan ekonomi) terpenuhi, individu akan mulai memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti rasa aman, kasih sayang, dan aktualisasi diri.⁷⁶ Dalam konteks ini, bantuan dari PKH memenuhi kebutuhan

⁷⁶Maslow A. H, *Motivasi dan Kepribadian* (Jakarta: Erlangga, 2016).

ekonomi keluarga, sehingga orang tua dapat lebih fokus pada kebutuhan tumbuh kembang dan kesehatan anak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Okfelina yang menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH di Desa Lauke, Kecamatan Simeulie Tengah Kabupaten Simeulue sudah sangat terbantu dengan fasilitas kesehatan yang diterimanya melalui bantuan PH, Ibu hamil/menyusui dapat memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, balita juga dapat memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan.⁷⁷

c. Peran PKH dalam Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Lamunre mengenai peran bantuan PKH menyatakan bahwa sudah memiliki peran yang baik. Selama ini di Desa Lamunre, bantuan PKH sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi penerima bantuan PKH. Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Dengan adanya bantuan tersebut, ibu yang memiliki anak merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah sehingga beban orang tua dalam kewajiban menyekolahkan anak sudah sedikit lebih ringan. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga yang memiliki anak balita dan anak usia dini, dengan diperolehnya bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga yang memiliki anak balita atau anak usia dini sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, bantuan tersebut

⁷⁷Okfelina, 'Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue', (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 59

juga menjadi solusi bagi lansia di Desa Lamunre dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena secara kemampuan lansia sudah tidak mampu bekerja lagi namun masih memiliki kebutuhan hidup seperti membeli kebutuhan sehari-hari, obat-obatan dan keperluan lainnya.

Hasil yang diperoleh tersebut menginformasikan bahwa bantuan PKH di Desa Lamunre, dapat meningkatkan ekonomi bagi penerima bantuan PKH. Selain manfaat langsung yang dirasakan berupa pemberian dana, bantuan PKH diketahui dapat mensejahterakan masyarakat penerima bantuan melalui pengembangan usaha yang sudah ada atau membuka suatu usaha demi memperoleh kemandirian hidup. Hal ini dilakukan atas arahan dan bimbingan yang dilakukan oleh pendamping PKH apabila dana PKH yang diperoleh sudah dipergunakan sesuai dengan aturan namun masih ada sisa sehingga dana tersebut tidak habis untuk hal yang tidak diperuntukkan namun dapat digunakan untuk hal lain seperti membuka usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara tidak langsung.

Berdasarkan informasi-informasi yang telah diuraikan, penulis dapat simpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Lamunre telah dilaksanakan pada ketiga aspek tersebut sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana program PKH telah berperan baik dalam aspek pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Nur Rizqi yang menyatakan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang

meliputi tiga aspek yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek kesejahteraan sosial.⁷⁸

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara

Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala atau tantangan. Kendala-kendala ini meliputi:

a. Ketidakpastian jadwal pencairan dana bantuan

Salah satu temuan penting dalam wawancara dengan keluarga penerima manfaat (KPM) mengenai kendala dalam pelaksanaan bantuan PKH adalah ketidakpastian jadwal pencairan dana bantuan yang menjadi sumber keresahan. Para informan menyampaikan bahwa informasi pencairan yang tidak pasti menyebabkan kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga, terutama kebutuhan anak-anak.

Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa ketidakteraturan informasi pencairan dana berdampak langsung pada strategi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, beberapa penerima terpaksa harus berutang sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, informan juga menyoroti minimnya akses informasi resmi terkait jadwal dan prosedur pencairan. Akibatnya, mereka lebih banyak mengandalkan informasi dari lingkungan sekitar atau media sosial yang belum tentu akurat. Kondisi ini menciptakan potensi penyebaran informasi yang keliru

⁷⁸ Mutia Nur Rizqi, 'Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam', (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 112

dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem distribusi bantuan. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan komunikasi dua arah antara pelaksana program dan penerima manfaat, agar proses pencairan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Teori yang relevan untuk menganalisis situasi ini adalah *Welfare State*, yang menekankan bahwa pemerintahan negara diklaim mempunyai tanggung jawab didalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap kehidupan pada tiap-tiap penduduk negaranya.⁷⁹ Dalam kerangka ini, kesejahteraan tidak sekadar dipahami sebagai bantuan tunai sesaat, melainkan jaminan keberlanjutan hidup yang layak bagi setiap warga negara. Dalam konteks PKH, ketidakpastian jadwal pencairan dan minimnya akses informasi resmi menunjukkan belum optimalnya peran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian sosial bagi penerima manfaat. Hal ini menegaskan bahwa agar PKH benar-benar sesuai dengan prinsip *Welfare State*, perlu adanya sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Mulyani & Arfah yang menemukan bahwa keberhasilan PKH sangat tergantung pada kualitas pendampingan dan keberadaan program pendukung seperti pelatihan keterampilan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa KPM yang mendapatkan

⁷⁹ Pamungkas, T. J., & Hariri, A. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial persepektif *Welfare State*. *Media of Law and Sharia*, 3(4), (2022): 270-283. <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>

pelatihan keterampilan mengalami peningkatan pendapatan hingga 20%, sedangkan yang tidak, tetap stagnan secara ekonomi.⁸⁰

b. Permasalahan Validasi dan Pemutakhiran Data

Di samping pencairan dana, permasalahan validasi dan pemutakhiran data juga menjadi kendala yang sangat krusial. Pendamping PKH dan sekretaris desa menyatakan bahwa basis data yang digunakan masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum tentu mencerminkan kondisi riil masyarakat. Akibatnya, banyak keluarga layak belum terdata, sementara keluarga yang sudah cukup mampu tetap menerima bantuan.

Dari data yang diperoleh bahwa ketidaktepatan data ini menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem informasi kesejahteraan yang digunakan oleh pemerintah. Masih lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan data menyebabkan proses verifikasi menjadi lambat dan tidak responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat desa.

Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program. Ketidaktepatan sasaran ini umumnya dipengaruhi oleh validasi dan pemutakhiran data yang belum optimal serta koordinasi antarlevel pemerintahan yang belum berjalan maksimal. Masalah validasi dan pemutakhiran data pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap efektivitas PKH dalam penanggulangan kemiskinan. Jika data penerima tidak tepat sasaran, maka program cenderung tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kesenjangan antara penerima

⁸⁰ Mulyani dan Arfah, "Pengaruh Pendampingan Dan Pelatihan Keterampilan Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Pemberdayaan Sosial Indonesia* 5, no. 2 (2022): 1–15.

dan nonpenerima juga dapat memperlebar potensi konflik sosial di masyarakat desa.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, pendamping PKH, dan partisipasi masyarakat. Dengan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, program PKH dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Keterbatasan Pendamping PKH dan Minimnya alat Pendukung

Keterbatasan pendamping PKH juga sebagai kendala dalam pelaksanaan bantuan PKH dimana jumlah pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya di Desa Lamunre, hanya terdapat satu orang pendamping yang bertanggung jawab atas lebih dari 300 keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan jumlah tersebut, proses monitoring, kunjungan rumah, dan pelaporan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Selain keterbatasan pendamping PKH, minimnya alat pendukung saat menjalankan tugasnya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan PKH seperti kendaraan operasional dan tunjangan lapangan. Mengingat letak geografis desa yang tersebar, pendamping kerap mengalami kendala mobilitas, terutama saat cuaca tidak mendukung. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat keberhasilan pembinaan dan pengawasan program.

d. Minimnya Program Pendampingan Ekonomi

Sebagian penerima manfaat juga menyampaikan belum pernah mendapatkan pelatihan keterampilan atau kegiatan pemberdayaan yang dijanjikan sebagai bagian dari PKH. Padahal, pelatihan tersebut dinilai penting untuk membekali keluarga miskin dengan kemampuan produktif yang dapat

meningkatkan penghasilan mereka secara mandiri. Tanpa adanya program pelengkap berupa pelatihan kerja atau kewirausahaan, PKH berisiko hanya menjadi bantuan tunai sesaat tanpa efek jangka panjang. Beberapa informan bahkan merasa stagnan secara ekonomi karena tidak ada peningkatan kapasitas pribadi maupun keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan PKH di Desa Lamunre masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu segera dibenahi. Mulai dari keterlambatan pencairan dana, akurasi data, keterbatasan pendamping dan minimnya alat pendukung hingga minimnya program pendampingan ekonomi, semuanya saling berkaitan dan berpotensi menurunkan efektivitas program. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk memperkuat sistem manajemen, meningkatkan literasi penerima, serta menyediakan program pemberdayaan yang nyata. Hanya dengan pendekatan holistik, PKH dapat berfungsi optimal dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

e. Keterbatasan Pemahaman dan Edukasi Penerima PKH

Salah satu penerima manfaat PKH masih menunjukkan keterbatasan pemahaman mengenai tujuan utama program ini. Informan tersebut menganggap PKH semata-mata sebagai bantuan tunai untuk kebutuhan konsumtif harian, bukan sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya literasi ini membuat bantuan yang diterima tidak dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya cenderung habis dalam jangka pendek tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian keluarga miskin.

Keterbatasan edukasi juga terlihat dari rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi maupun pertemuan kelompok yang difasilitasi oleh pendamping. Ketidakhadiran dalam kegiatan tersebut membuat informasi mengenai pemanfaatan bantuan secara tepat tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, informan masih menyamakan PKH dengan program bantuan tunai lainnya, tanpa memahami aspek pemberdayaan yang menjadi esensi dari program ini.

Dengan demikian, hambatan berupa keterbatasan pemahaman dan edukasi meskipun hanya dialami oleh sebagian kecil penerima tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan literasi, pendampingan intensif, dan edukasi berkelanjutan, PKH berisiko hanya dipandang sebagai subsidi sementara, bukan sarana memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui peran aktif pendamping, peningkatan kapasitas penerima, serta integrasi dengan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, agar PKH benar-benar mampu mencapai tujuan jangka panjangnya.

f. Ketergantungan terhadap Bantuan

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penerima manfaat PKH menyampaikan bahwa bantuan yang diterima sering kali langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya usaha untuk mengalokasikan sebagian dana pada kegiatan produktif. Pola pemanfaatan seperti ini menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan pada bantuan, di mana keluarga merasa aman karena adanya dana rutin dari pemerintah, namun kurang berinisiatif untuk mencari alternatif penghasilan lain.

Ketergantungan terhadap bantuan ini menimbulkan risiko stagnasi ekonomi, sebab penerima tidak terdorong untuk berupaya meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. PKH yang seharusnya berfungsi sebagai stimulan untuk memperbaiki kualitas hidup justru berpotensi disalahartikan sebagai sumber penghidupan utama. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat tujuan besar program, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan perlu diatasi melalui peningkatan kualitas pendampingan dan penyediaan program pelengkap yang mendorong kemandirian, seperti pelatihan kewirausahaan, akses modal usaha, atau pemberdayaan berbasis komunitas. Hanya dengan pendekatan tersebut, bantuan tunai dapat berfungsi optimal sebagai instrumen transformatif, bukan sekadar penopang sementara.

g. Dampak Sosial di Masyarakat

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga penerima, tetapi juga memunculkan dinamika sosial di masyarakat. Seorang penerima manfaat menuturkan bahwa bantuan PKH kerap menimbulkan kecemburuan dari warga yang tidak menerima, sehingga memicu salah paham antarwarga dan menciptakan hubungan sosial yang kurang harmonis. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial masyarakat setempat.

Ketika kecemburuan sosial muncul, efektivitas PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat berkurang karena program tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, keberhasilan

penanggulangan kemiskinan membutuhkan dukungan kolektif, baik dari penerima maupun non-penerima. Oleh karena itu, transparansi data, kejelasan kriteria penerima, serta sosialisasi yang menyeluruh menjadi syarat penting agar PKH tidak menimbulkan konflik sosial.

Dengan memperkuat aspek sosial dalam implementasinya, PKH berpotensi lebih efektif sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga harus mampu menjaga kohesi sosial agar tercipta lingkungan masyarakat yang saling mendukung. Harmonisasi sosial inilah yang pada akhirnya dapat memperkuat peran PKH dalam mengurangi kesenjangan dan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat di Desa Lamunre

Program Keluarga Harapan (PKH) membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Lamunre. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai semata, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga. Seluruh informan yang diwawancarai menyampaikan bahwa kehidupan mereka menjadi lebih tertata dan kebutuhan dasar keluarga lebih terjamin sejak menjadi penerima manfaat PKH.

a. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Salah satu dampak utama yang dirasakan dari implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre adalah meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Informan yang memiliki anak usia sekolah menyatakan

bahwa mereka kini lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan seperti seragam sekolah, alat tulis, buku, dan biaya lainnya. Bantuan PKH juga mewajibkan anak untuk aktif bersekolah sebagai syarat menerima bantuan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan pendidikan formal.

Selain aspek pendidikan, dampak PKH juga sangat terasa dalam aspek kesehatan, terutama bagi ibu dan anak maupun lansia. Banyak ibu yang mengaku lebih disiplin mengikuti jadwal posyandu dan imunisasi setelah menjadi peserta PKH. Sebelum bergabung dalam program, sebagian besar dari mereka tidak memahami pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin. Kemudian, ada juga salah satu informan yang lansia mengatakan bahwa ia sebelumnya jarang ke puskesmas untuk memeriksa kesehatannya dan membeli obat karena keterbatasan biaya. Namun, setelah mendapat bantuan PKH, kunjungan ke layanan kesehatan menjadi lebih rutin.

a. Pengurangan Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa bantuan tunai yang diterima melalui program PKH dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti membeli kebutuhan pokok harian, biaya pendidikan anak, dan menunjang biaya kesehatan. Dengan adanya bantuan tersebut, keluarga penerima manfaat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendapatan utama yang sangat terbatas sehingga mampu mengurangi tekanan ekonomi keluarga.

Secara ekonomi, meskipun belum mampu menanggulangi kemiskinan secara penuh namun, keluarga penerima manfaat bantuan PKH telah memberikan

perubahan pola pengeluaran, dimana sebagian kebutuhan keluarga yang sebelumnya harus dipenuhi dari penghasilan utama kini tertutupi oleh dana PKH. Beberapa keluarga penerima manfaat juga mulai menunjukkan upaya untuk memanfaatkan bantuan secara lebih produktif. Pendamping PKH mengungkapkan bahwa sebagian kecil KPM mulai menyisihkan dana bantuan untuk usaha kecil, seperti menjual kue, berjualan sayur, atau beternak ayam. Meskipun skalanya masih kecil, langkah ini menunjukkan benih kemandirian ekonomi.

Namun demikian, dampak terhadap kemandirian ekonomi belum begitu signifikan. Mayoritas penerima manfaat masih mengandalkan PKH sebagai satu-satunya sumber pendapatan tetap. Beberapa ibu rumah tangga mengaku tidak memiliki keterampilan kerja atau akses terhadap modal usaha yang cukup untuk memulai usaha secara mandiri. Pemerintah desa menyadari bahwa PKH berfungsi sangat baik dalam meredam dampak kemiskinan ekstrem, tetapi belum menyentuh akar permasalahan struktural seperti rendahnya pendidikan orang tua, keterbatasan lapangan kerja, dan akses pelatihan. Oleh karena itu, mereka menyarankan adanya integrasi antara PKH dengan program pemberdayaan lainnya.

b. Mendorong Perubahan Perilaku dalam Mengakses Layanan dan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan

Penerima manfaat bantuan PKH di Desa Lamunre juga mengalami perubahan perilaku atau pola pikir mengenai pendidikan dan kesehatan, bahwa pentingnya pendidikan dan kesehatan telah disadari oleh penerima manfaat karena pendidikan merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Dan kesehatan bagi mereka yang mempunyai balita dan lansia sudah rutin untuk memeriksa kesehatan mereka di Posyandu dan Puskesmas. Hal tersebut

membuktikan bahwa mereka sudah sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Perubahan perilaku dalam memanfaatkan layanan kesehatan ini bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga menunjukkan terjadinya pergeseran kesadaran. Informasi yang diberikan oleh pendamping serta kewajiban evaluasi berkala menjadi pendorong utama partisipasi aktif keluarga dalam layanan kesehatan dasar.

Terciptanya perubahan perilaku atau penerima manfaat bantuan tidak terlepas dari pendamping PKH yang selalu membantu kesulitan Keluarga Penerima Manfaat, mendampingi, dan mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan sekali sebulan. Dalam pertemuan tersebut, biasanya membahas mengenai materi tentang PKH, cara pengolahan dana bantuan PKH yang tepat, dan juga mengubah pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika kita lihat dari jumlah/nominal bantuan yang didapatkan untuk menutupi beban pengeluaran akan dirasa tidak cukup/masih kurang. Maka dari hal tersebut KPM diberikan pendampingan agar pola fikir mereka dapat terbuka sehingga akan terjadi perubahan perilaku/pola fikir.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara khususnya dalam akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, mendorong perubahan perilaku dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berbasis kemandirian, diperlukan penguatan aspek pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi PKH dengan program

pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses permodalan menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan demi memutus rantai kemiskinan secara tuntas.

Teori yang sejalan dengan peran PKH dalam perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan ini dapat dikaitkan dengan Teori Modal Sosial yang dikemukakan oleh Putnam dan dikembangkan dalam konteks Indonesia oleh Apriyanto.⁸¹ Menurut Apriyanto, modal sosial seperti jaringan komunitas, kepercayaan, dan norma timbal balik dapat diperkuat melalui interaksi dalam program bantuan sosial seperti PKH. Keberadaan kelompok pertemuan rutin, pendampingan, dan kewajiban sosial dalam program ini menciptakan struktur sosial yang mendukung peningkatan kapabilitas individu dan keluarga miskin.

Temuan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Sutarmi dan Handayani yang berjudul “Evaluasi Dampak PKH terhadap Kesejahteraan Sosial Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sleman”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa penerima PKH mengalami peningkatan akses layanan dasar hingga 35% dan peningkatan partisipasi pendidikan sebesar 28%. Penelitian ini menekankan bahwa program PKH tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga secara sosial dan kultural dalam membangun kemandirian keluarga miskin.⁸²

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chelvin Aldiansyah dkk bahwa dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar bagi anak-anak, pengurangan

⁸¹Apriyanto, “Modal Sosial Dalam Program Bantuan Sosial: Studi Pada Penerima Program Keluarga Harapan Di Indonesia,” *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 17, no. 1 (2022): 45–60.

⁸²Sutarmi dan Handayani, “Evaluasi Dampak PKH Terhadap Kesejahteraan Sosial Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sleman,” *Jurnal Sosial* 18, no. 2 (2023): 45–59.

beban pengeluaran rumah tangga serta menciptakan perubahan perilaku/pola pikir dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.⁸³



⁸³ Chelvin Aldiansyah, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* 3, No. 1 (2024), 33

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan terdahulu, kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamunre meliputi tiga aspek yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara yaitu ketidakpastian jadwal pencairan dana bantuan, permasalahan validasi dan pemutakhiran data, keterbatasan pendamping PKH dan minimnya alat pendukung, minimnya program pendampingan ekonomi, keterbatasan pemahaman dan edukasi penerima pkh, ketergantungan terhadap bantuan dan dampak sosial di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan desa untuk memperkuat sistem manajemen, meningkatkan literasi penerima, dan menyediakan program pemberdayaan yang nyata.
3. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara yaitu meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, serta mendorong perubahan perilaku dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) Kabupaten Luwu

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu melalui Dinas Sosial disarankan untuk memperkuat tata kelola PKH dengan memastikan kepastian jadwal pencairan bantuan, melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala, serta menambah jumlah dan kapasitas pendamping beserta sarana pendukungnya. Selain itu, program pendampingan ekonomi perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan dan akses usaha agar penerima tidak bergantung pada bantuan semata. Edukasi mengenai pengelolaan keuangan, kesehatan, dan pendidikan anak juga penting dilakukan, disertai transparansi dalam penentuan penerima manfaat guna mencegah kecemburuan sosial di masyarakat.

2. Bagi Penerima PKH

Penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan PKH sesuai peruntukannya, yaitu untuk mendukung pendidikan anak, pemenuhan gizi, dan kesehatan ibu dan balita. Selain itu, penerima juga perlu membangun kesadaran untuk tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan, melainkan mulai berupaya mandiri melalui usaha kecil atau kegiatan produktif rumah tangga yang sesuai dengan kemampuan dan potensi keluarga.

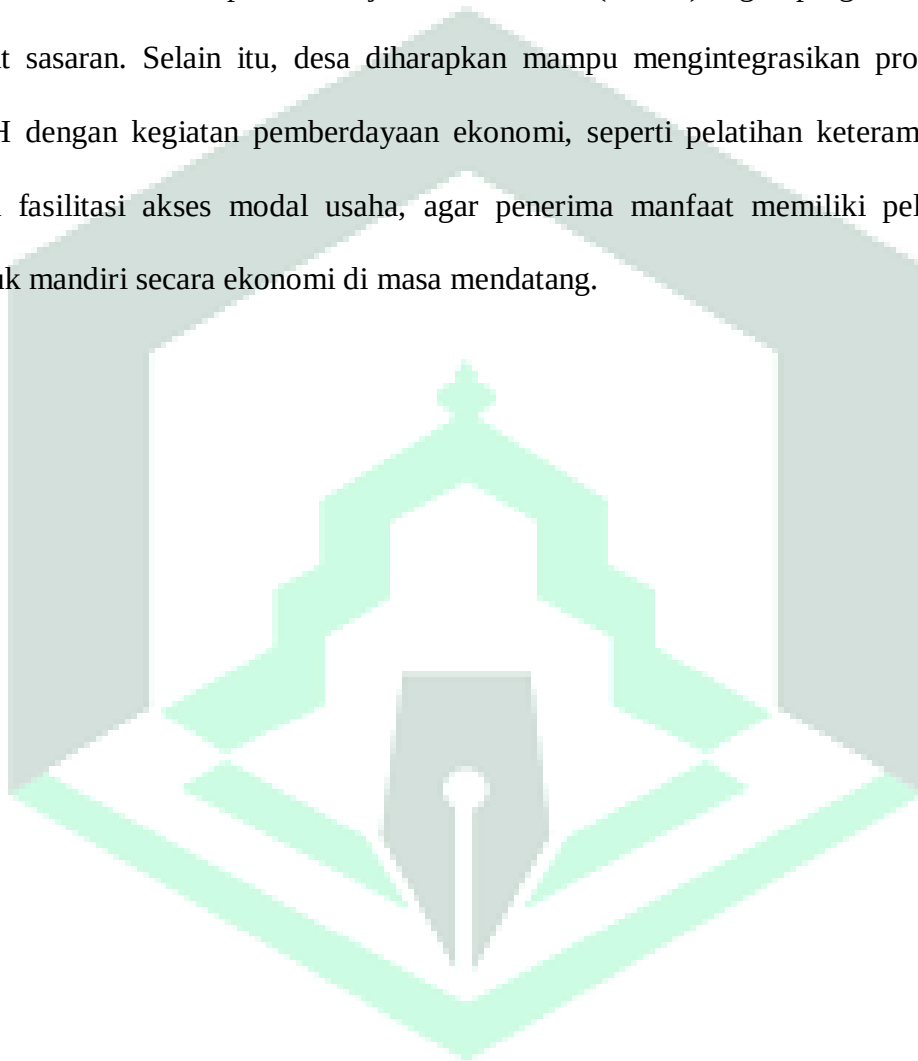
3. Bagi Pendamping PKH

Pendamping diharapkan dapat memperkuat peran edukatif dan pemantauan kepada penerima manfaat, tidak hanya sebatas administrasi dan pelaporan. Kunjungan rumah secara berkala dan pendekatan persuasif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan digunakan dengan benar, serta

kewajiban program seperti kehadiran anak di sekolah dan posyandu benar-benar dijalankan oleh keluarga penerima.

4. Bagi Aparat Desa

Aparat desa perlu meningkatkan akurasi dalam proses pendataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar program PKH tepat sasaran. Selain itu, desa diharapkan mampu mengintegrasikan program PKH dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau fasilitasi akses modal usaha, agar penerima manfaat memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Sistematis Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Akhmad, Khabib Alia. "Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 6 (2021): 173–81. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/419>.
- Alwi, Muhammad. "Program Keluarga Harapan Dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar." *Sosio Konsepsia* 11, no. 1 (2021): 307–19. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458>.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, and Pahri Pahri. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.
- Apriyanto. "Modal Sosial Dalam Program Bantuan Sosial: Studi Pada Penerima Program Keluarga Harapan Di Indonesia." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 17, no. 1 (2022): 45–60.
- Ardhito Bhinadi. *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ashar, Baihaqi, and Hendi Pratama. "Dampak Multidimensi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Jakarta." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 16. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.358>.
- Aulya Wardani, Winda, M. Ismail, Edy Kurniawansyah, and Sawaludin Sawaludin. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 4 (2023): 2189–96. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>.
- Bari, A., & Hidayat, R. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget. *MOTIVASI Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1), (2022): 8-14.
- BPS. *Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil, 2020.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017.
- Dollu, E. B. S., & Tokan, F. B. MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Warta Governare*, 1(1), (2020): 59-72. [https://journal.unwira.ac.id > article > download](https://journal.unwira.ac.id/article/download)
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>.

Fasiha, and Muhammad Alwi. "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan the Urgence of Financial Management of Households Beneficiaries of the Hope Family Program in Increasing Welfare" 9, no. 01 (2023).

Kemensos. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021.

Kemensos. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020.

Lestari. *Transformative Social Protection Dalam Kebijakan Sosial Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2021.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.

Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

Mulyani dan Arfah. "Pengaruh Pendampingan Dan Pelatihan Keterampilan Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Pemberdayaan Sosial Indonesia* 5, no. 2 (2022): 1–15.

Pamungkas, T. J., & Hariri, A. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), (2022): 270-283. <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>

Rahmawati dan Yusuf. "Dampak PKH Terhadap Peningkatan Indeks Kesejahteraan Rumah Tangga Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Kebijakan Sosial Dan Pemberdayaan* 6, no. 1 (2023): 55–70.

Reza Dasangga, Dian Ghani, and Eko Fajar Cahyono. "Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1060. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>.

Ronny Kountur. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PPM, 2018.

Saragi, Siswati, Maria Ulfa Batoebara, and Nur Ambia Arma. "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 8, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>.

Siti Maimunah. "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Untuk Mendukung Pencapaian SDGs 2030 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember." *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2024.

Sofianto, Arif. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Jawa Tengah." *Sosio Konsepsia* 10, no. 1 (2020): 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>.

Sudirman. "Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Neo*

Societal 5, no. 4 (2020): 381–94.
http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Ambo_Upe/9.COLLABORATIVE_GOVERNANCE.pdf.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sumarwan, U. *Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Susanto, Rudy, and Indah Pangesti. “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 7, no. 2 (2021): 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>.

Sutarmi dan Handayani. “Evaluasi Dampak PKH Terhadap Kesejahteraan Sosial Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sleman.” *Jurnal Sosial* 18, no. 2 (2023): 45–59.

Sutaryo. *Pendekatan Kapabilitas Dan Pembangunan Manusia Dalam Konteks Kebijakan Sosial Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Triani, Yesi, Maya Panorama, and Rinol Sumantri. “Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 158. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635>.

Tulus T.H. Tambunan. *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Utami, Isti Putri, Kordiyana K Rangga, Helvi Yanfika, and Abdul Mutolib. “Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung.” *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 19–25. <https://doi.org/10.32487/jsHP.v5i1.901>.

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA LAMUNRE KECAMATAN BELOPA UTARA

Pertanyaan Wawancara untuk Kepala Desa

Peran PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan:

1. Bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di desa ini?
2. Sejauh mana PKH membantu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan?
3. Apa saja bentuk dukungan dari pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH?

Kendala dalam Pelaksanaan PKH:

4. Apa saja kendala utama yang dihadapi desa dalam menyalurkan bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat?
5. Bagaimana desa mengatasi permasalahan terkait validasi data penerima PKH?
6. Apakah ada keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan PKH? Jika ada, bagaimana cara desa menanganinya?

Dampak PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat:

7. Apakah ada perubahan signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan PKH?
8. Bagaimana PKH berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini?
9. Adakah program tambahan dari desa yang mendukung kemandirian ekonomi keluarga penerima PKH?

Pertanyaan Wawancara untuk Sekretaris Desa

Peran PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan:

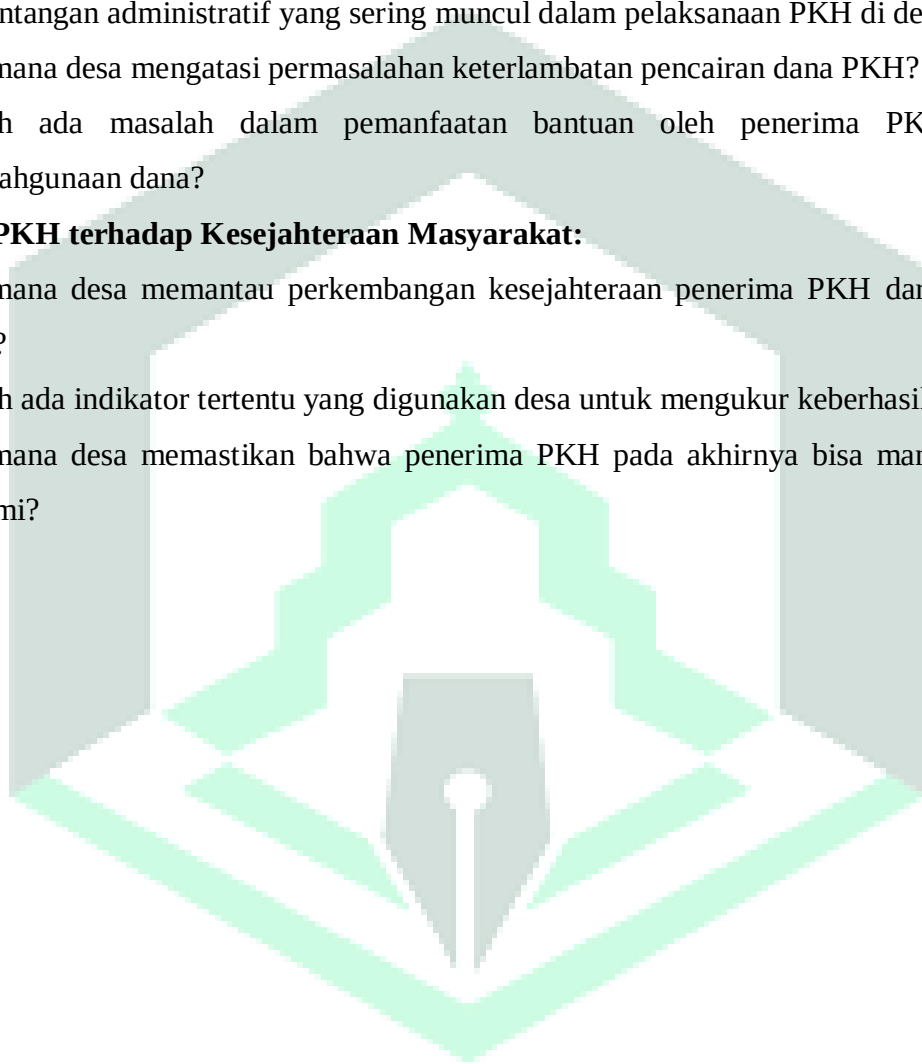
1. Bagaimana mekanisme pendataan dan seleksi penerima manfaat PKH di desa ini?
2. Seberapa efektif PKH dalam meningkatkan taraf hidup keluarga miskin di desa ini?
3. Apakah ada koordinasi antara desa dan pendamping PKH dalam memastikan bantuan tepat sasaran?

Kendala dalam Pelaksanaan PKH:

4. Apa tantangan administratif yang sering muncul dalam pelaksanaan PKH di desa ini?
5. Bagaimana desa mengatasi permasalahan keterlambatan pencairan dana PKH?
6. Apakah ada masalah dalam pemanfaatan bantuan oleh penerima PKH, seperti penyalahgunaan dana?

Dampak PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat:

7. Bagaimana desa memantau perkembangan kesejahteraan penerima PKH dari waktu ke waktu?
8. Apakah ada indikator tertentu yang digunakan desa untuk mengukur keberhasilan PKH?
9. Bagaimana desa memastikan bahwa penerima PKH pada akhirnya bisa mandiri secara ekonomi?



Pertanyaan Wawancara untuk Keluarga Penerima PKH

Peran PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan:

1. Bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Anda?
2. Apakah bantuan PKH memudahkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak Anda?
3. Apakah ada pelatihan atau pendampingan yang diberikan melalui PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga?

Kendala dalam Pelaksanaan PKH:

4. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam pencairan atau penerimaan dana PKH? Jika ya, apa kendalanya?
5. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengikuti kewajiban yang ditetapkan oleh program PKH, seperti kehadiran dalam pertemuan atau pemeriksaan kesehatan anak?
6. Apakah ada dukungan lain yang Anda harapkan dari PKH agar lebih bermanfaat bagi keluarga?

Dampak PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat:

7. Sejauh mana bantuan PKH membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga Anda?
8. Apakah ada perubahan signifikan dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak setelah mendapatkan bantuan PKH?
9. Apakah Anda merasa PKH cukup membantu dalam mengurangi beban ekonomi keluarga, atau masih ada tantangan yang dihadapi?

Pertanyaan Wawancara untuk Pendamping PKH

Peran PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan:

1. Bagaimana Anda melihat peran program PKH dalam membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kondisi kemiskinan?
2. Menurut Anda, sejauh mana bantuan PKH berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak penerima manfaat?
3. Apakah Anda melihat perubahan positif dalam kesejahteraan keluarga sejak mereka bergabung dalam program PKH?

Kendala dalam Pelaksanaan PKH:

4. Apa saja kendala yang paling sering Anda temui dalam proses penyaluran bantuan PKH?
5. Bagaimana tantangan Anda dalam memastikan kepatuhan keluarga penerima terhadap kewajiban program, seperti hadir di posyandu atau sekolah?
6. Apa bentuk dukungan yang Anda butuhkan agar dapat menjalankan tugas sebagai pendamping PKH dengan lebih efektif?

Dampak PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat:

7. Berdasarkan pengamatan Anda, bagaimana perubahan kualitas hidup keluarga penerima manfaat setelah mengikuti program PKH?
8. Apakah ada cerita sukses dari keluarga dampingan Anda yang menunjukkan dampak signifikan dari program ini?
9. Menurut Anda, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari program PKH agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan?

Tabel Reduksi Data Penelitian

Informan	Pernyataan Penting	Kode/Kategori	Sub-tema	Tema Utama
Kepala Desa	PKH sangat membantu warga miskin, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan.	Dampak Positif PKH	Manfaat program PKH	Peran PKH dalam pengurangan kemiskinan
Sekretaris Desa	Pendataan penerima manfaat masih belum merata, masih ada warga miskin yang belum terdata.	Kendala Data	Validitas data penerima	Kendala pelaksanaan PKH
Pendamping PKH	Masih ada keterlambatan pencairan dan kendala teknis di lapangan.	Masalah Teknis	Implementasi teknis	Kendala pelaksanaan PKH
KPM: Suhaeda	Bantuan PKH saya gunakan untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan pokok.	Pemanfaatan Dana PKH	Penggunaan bantuan oleh KPM	Dampak PKH terhadap kesejahteraan keluarga
KPM: Hasnawiyah	Saya gunakan bantuan PKH untuk sembako dan sekolah anak. Saya juga aktif hadir dalam pertemuan kelompok.	Pemanfaatan Dana PKH	Partisipasi KPM	Dampak PKH terhadap kesejahteraan keluarga
KPM: Sandra	Dana PKH sangat membantu untuk biaya pendidikan anak-anak saya.	Manfaat Pendidikan	Bantuan pendidikan	Peran PKH dalam pengurangan kemiskinan
KPM: Hariani	Saya memanfaatkan bantuan PKH untuk	Gizi dan Kesehatan Anak	Akses layanan kesehatan	Peran PKH dalam peningkatan layanan dasar

	kebutuhan gizi anak dan ikut posyandu rutin.			
KPM: Santi	Bantuan PKH saya pakai untuk biaya sekolah anak dan menambah modal warung kecil.	Bantuan untuk Pendidikan dan Usaha	Pemberdayaan ekonomi kecil	Dampak ekonomi PKH
KPM: Darwis Amir	Saya merasa terbantu karena bisa beli sembako dan obat. Pelayanan di puskesmas juga dimudahkan.	Dampak Positif PKH	Manfaat bantuan sosial	Peran PKH dalam pengurangan kemiskinan
Pendamping PKH: Armayanti	Kami sering menghadapi kendala validasi data dan terbatasnya operasional untuk menjangkau semua KPM.	Kendala Operasional	Masalah implementasi	Kendala pelaksanaan PKH
Sekretaris Desa: Nurlaelah	Kami berperan dalam verifikasi data penerima dan memantau penggunaan bantuan agar tepat sasaran.	Peran Aparat Desa	Koordinasi dan pengawasan	Peran pihak desa dalam pelaksanaan PKH

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Wawancara Bapak Syahrir, Kepala Desa)



(Wawancara ibu Nurlaelah, Sekretaris Desa)





(Wawancara ibu Armayanti, Pedamping PKH)



(Wawancara ibu Suhaeda (Penerima PKH)



(Wawancara ibu Santi, Penerima PKH)



(Wawancara ibu Sandra (Penerima PKH)



(Wawancara Ibu Hasnawiyah, Penerima PKH)



(Wawancara ibu Hariani, Penerima PKH)



LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0156/PENELITIAN/06.07/DPMTSP/IV/2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Lamunre
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo : B 106/In.19/FEBI/HM.01/04/2025 tanggal 25 April 2025 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Della Rasli
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 27 Januari 2004
Nim : 2104010021
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Lamunre
Desa Lamunre
Kecamatan Belopa Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA LAMUNRE KECAMATAN BELOPA UTARA

Yang akan dilaksanakan di **DESA LAMUNRE**, pada tanggal **28 April 2025 s/d 28 Mei 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 28 April 2025
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Della Rasli;
5. Arsip.

LAMPIRAN 4

Hasil Turnitin

DELLA RASLI			
ORIGINALITY REPORT			
24%	23%	14%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%	
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%	
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
4	123dok.com Internet Source	1%	
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%	
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%	
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%	
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
9	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1%	

RIWAYAT HIDUP



Della Rasli, Lahir di Palopo pada tanggal 27 Januari 2004. Penulis merupakan anak satu-satunya dari pasangan seorang ayah bernama Rasli dan Ibu Darmasari. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Lamunre, Kota Belopa, Kab Luwu, Kec Belopa utara. Pendidikan Sekolah Dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 24 Kampung Tangnga. Kemudian, Pada Tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Luwu dan selesai pada tahun 2021. penulis melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 2021 di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi: ***“Peran Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara”***. Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diimpikan, Aamiin. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sesuai dengan perjalanan hidup penulis.

Contact Person Penulis

No. Telp/No WhatsApp : 081315219218

E-Mail : 2102843040@iainpalopo.ac.id